

**ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN PERKAPITA
MASYARAKAT DAN SUKU BUNGA KREDIT TERHADAP
PERMINTAAN KREDIT KONSUMSI PERBANKAN DI
SULAWESI SELATAN PERIODE 1998-2007**



*Skripsi Sarjana Lengkap Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi*

Universitas Hasanuddin Makassar

Oleh
AL KAUSAR
A 111 04 012

PERPUSTAKAAN	
Tgl. Terima	1 - 12 - 08
Asal Dari	Ekonomi
Sampul	1 eksemplar
Harga	Gratis
No. Inventaris	325
SKP - E08	

**FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN ILMU EKONOMI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2008**

Alk
a

**ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN MASYARAKAT DAN
SUKU BUNGA KREDIT TERHADAP PERMINTAAN KREDIT
KONSUMSI PERBANKAN DI SULAWESI SELATAN
PERIODE 1998-2007**

Disusun oleh :

A.L KAUSAR
A1104012

**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2008**

SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN MASYARAKAT DAN TINGKAT SUKU BUNGA KREDIT TERHADAP PERMINTAAN KREDIT KONSUMSI PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE TAHUN 1998-2007

Disusun Oleh :

AL KAUSAR
A11104012

SKRIPSI SARJANA LENGKAP UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN
PERSYARATAN GUNA MENCAPAI GELAR SARJANA EKONOMI PADA
FAKULTAS EKONOMI JURUSAN ILMU EKONOMI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

Telah Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing

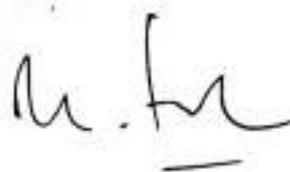
Pembimbing I



DR. Paulus Uppun, MA

NIP : 130 475 320

Pembimbing II



Nurhaena Bakhtiar, SE, M.SE

NIP: 132 205 413

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Illahi Rabbi, karena atas rahmat dan karunia-Nyalah sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul *“Analisis Pengaruh Pendapatan Perkapita Masyarakat dan Suku Bunga Kredit Terhadap Permintaan Kredit Konsumsi di Prov. Sulawesi Selatan Periode Tahun 1998-2007”* sebagaimana mestinya.

Penulis sadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidaklah dapat dilakukan dengan baik, bila bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak diabaikan. Sehubungan dengan itu pada kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan dan ketulusan hati menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya antara lain kepada :

1. *Ibu Dr. Hj. Rahmatiah, MA* selaku ketua jurusan Ilmu Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin.
2. *Bapak Dr. Paulus Uppun MA* sebagai pembimbing I sekaligus Penasehat Akademik, Serta *Ibu Nurhaena Bakhtiar SE.,MSE*, selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan bantuan kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
3. Staff Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin : *Pak Anri* dan *Pak Parman* yang telah banyak membantu penulis sepanjang penulisan skripsi ini.
4. Saudara seangkatan yang tergabung dalam (Musketeer's 04) penulis pada Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin :
Mulvi Affan SE, Aulia Rahman SE, Ezri Misran SE, Yakhin P.T SE, M. Maulana Rizal SE, Wahyuddin Adnan SE, A. Mallombassi, Fachrisandy R, M. Arif Nur, Khaerul Saleh LS, Julianto Anggi P, Darsam Belana, M. Shulkadri, Mughaffal Muin, A. Mahyuddin, Baji Suyadi, Ilham Akbar,

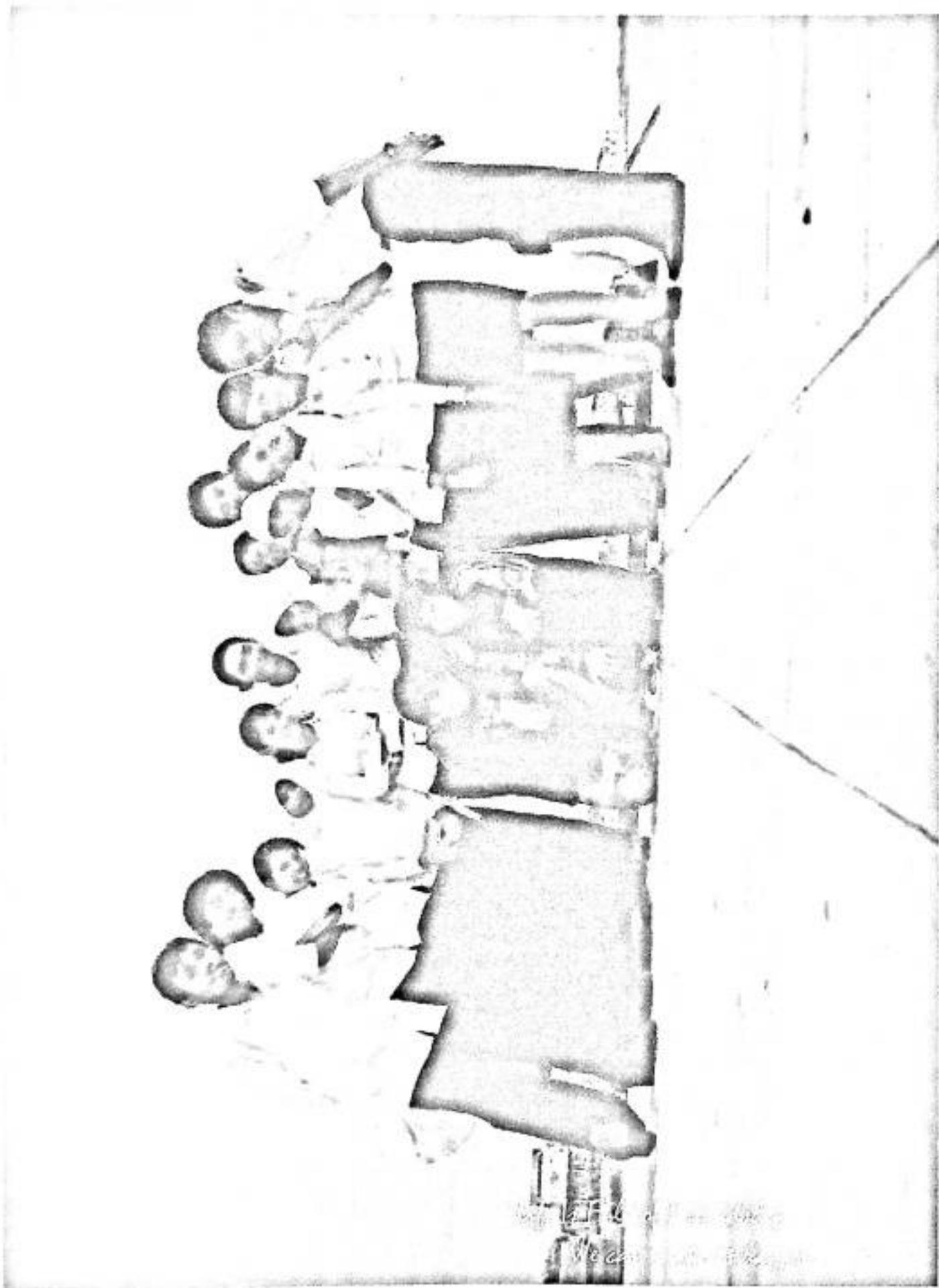
Asrul Syahrul, Maradona, Syaiful Bahja, Syahfuddin, Isnaeni, Astriana Putri SE, Nurlaela Alwy SE, Mitha Wahab SE, Dwita Wulandari SE, Afni SE, Ummul Khaeri SE, Khadijah SE, Suhartiny Sawedy SE, Raodasari SE, Khaeria Haris SE, Arina Puspita, Tiffany C. Mainaky, Fitriani, Eka Marpradifa, Mustaina, Utami Purwidiansari serta teman-teman yang turut memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini.

5. Dan tidak lupa kepada keluarga *Al Kalam* penulis *Kakanda Kasmawati Kalam, Arjuna Kalam SS, Azkar Kalam, Aris Kalam S.Sos, Ansaruddin S.STP, Wahyuni Kalam SS, Wasiati Kalam SE, Almubarak* serta *Adinda Anugrah Kalam*.

Dan penghargaan khusus kepada Ayahanda *Abd. Kadir* dan Ibunda *Nur Alam* yang selama ini senantiasa memberikan curahan cinta kasih dan sayangnya serta ketabahan dalam mengasuh, mendidik, membiayai dan mengarahkan penulis dan disertai iringan doa, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi Unhas. Kami menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kami sebagai manusia biasa. Sehingga saran, kritik dan tanggapan yang bersifat membangun akan kami terima demi kemajuan kami di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat menjadi bahan yang bermanfaat sebesar-besarnya bagi para pembaca dan yang membutuhkannya.

Makassar, November 2008

Penulis



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Perbankan.....	6
2.1.1 Definisi Bank.....	6
2.1.2 Sumber Dana Bank	8
2.2 Kredit.....	9
2.2.1 Pengertian Kredit.....	9
2.2.2 Tujuan Kredit.....	9
2.2.3 Fungsi Kredit	10
2.2.3 Jenis Kredit	13
2.3 Konsumsi.....	17
2.3.1 Konsumsi Rumah Tangga.....	18
2.3.2 Fungsi Konsumsi Menurut Keynes.....	19
2.4 Pendapatan.....	21

2.4.1 Pendapatan.....	21
2.4.2 Pendapatan per kapita.....	22
2.5 Tingkat Suku Bunga.....	23
2.5.1 Tingkat Suku Bunga Menurut Teori Klasik.....	24
2.4.2 Tingkat Suku Bunga Menurut Keynes.....	25
2.7 Teori Permintaan Uang	27
2.7 Studi Empirik.....	30
2.8. Kerangka Berpikir.....	33
2.9 Hipotesis.....	34

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Desain penelitian.....	35
3.1.1 Daerah Penelitian.....	35
3.1.2 Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.2 Jenis Dan Sumber Data.....	36
3.2.1 Jenis Data	36
3.2.2 Sumber Data	36
3.3 Model Analisis.....	37
3.4 Batasan Variabel	39

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum	40
4.2 Indikator Ekonomi Sul-Sel.....	40
4.2.1 Perkembangan dan Pertumbuhan Ekonomi	40
4.2.2 Struktur Ekonomi	43

4.2.3 PDRB per Kapita	43
4.3 Perkembangan Pendapatan per Kapita Sul-Sel.....	46
4.4 Perkembangan Tingkat Suku Bunga Kredit	49
4.5 Perkembangan Kredit Perbankan Sul-Sel.....	51
4.6 Hasil Perhitungan Empirik	53
4.6.1 Hubungan antara Suku Bunga dan Kredit Konsumsi	54
4.6.2 Hubungan antara Pendapatan Per Kapita dan Kredit Konsumsi ..	56

BAB V KESIMPULAN & SARAN

5.1 Kesimpulan.....	59
5.2 Saran.....	59

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1	posisi pinjaman kredit konsumsi, investasi dan modal kerja yang diberikan bank umum dan bpr.....	3
Tabel 2	PDB nasional dan PDRB sulawesi-sekatan atas dasar harga konstan 2002-2007	41
Tabel 3	Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi - Selatan 2002-2007.....	42
Tabel 4	Struktur ekonomi Sulawesi-Selatan tahun 2002-2007 dalam satuan persen.....	43
Tabel 5	PDB perkapita nasional dan PDRB perkapita sulawesi-sekatan tahun 2002-2007	45
Tabel 6	Perkembangan pendapatan per kapita (dalam juta rupiah).....	47
Tabel 7	Tingkat Pertumbuhan Suku bunga rata-rata kredit konsumsi, investasi dan modal kerja dalam persen	49
Tabel 8	Perkembangan kredit konsumsi Di sulawesi selatan tahun 1998-2007 (dalam juta rupiah)	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Grafik Fungsi Konsumsi menurut Keynes	20
Gambar 2 Grafik tingkat bunga menurut teori klasik	24
Gambar 3 Grafik tingkat bunga menurut Keynes	25
Gambar 4 Grafik motif transaksi	27
Gambar 5 Grafik motif spekulasi	28
Gambar 6 Grafik motif berjaga-jaga	29
Gambar 7 Scatter diagram suku bunga terhadap kredit konsums	54
Gambar 8 Scatter diagram pendapatan perkapita terhadap kredit konsumsi	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Grafik Fungsi Konsumsi menurut Keynes	20
Gambar 2 Grafik tingkat bunga menurut teori klasik	24
Gambar 3 Grafik tingkat bunga menurut Keynes	25
Gambar 4 Grafik motif transaksi	27
Gambar 5 Grafik motif spekulasi	28
Gambar 6 Grafik motif berjaga-jaga	29
Gambar 7 Scatter diagram suku bunga terhadap kredit konsums	54
Gambar 8 Scatter diagram pendapatan perkapita terhadap kredit konsumsi	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang Masalah

Kinerja makroekonomi regional di Sulawesi Selatan pada triwulan IV tahun 2007 tercatat mengalami peningkatan. Hal ini tercermin dari laju pertumbuhan ekonomi tahunan yang meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Namun demikian, peningkatan kinerja perekonomian daerah tersebut masih diikuti oleh laju inflasi tahunan yang sedikit meningkat dibandingkan periode sebelumnya.

Dalam teorinya, Keynes berpendapat bahwa bukan penawaran yang menentukan perekonomian tapi permintaanlah yang berperan penting. Dimana dalam bukunya *The General Theory of Employment, Interest and Money* Keynes mengajarkan bahwa kapitalisme pada dasarnya tidak stabil dan tidak berkecenderungan ke arah full employment. Tetapi pada saat yang sama dia menolak ide tentang perlunya nasionalisasi perekonomian, penetapan upah-harga, dan intervensi dalam penawaran dan permintaan. Karena itu menurut Keynes, perlu ada campur tangan dari pemerintah guna meningkatkan permintaan efektif agar produsen terangsang untuk memproduksi (*The General Theory of Employment, Interest and Money*, <http://www.amazon.com/2007>). Hal ini berarti bahwa, tingkat produksi aktual ditentukan oleh permintaan agregat, yakni kuantitas barang-barang dan jasa-jasa yang ingin dibeli oleh masyarakat, dunia usaha dan pemerintah. Kondisi permintaan agregat dapat kita analisis dengan melihat posisi konsumsi nasional.

Salah satu faktor yang mendorong perkembangan konsumsi adalah kredit untuk tujuan konsumsi yang juga cenderung meningkat dalam periode yang sama. Lembaga perbankan telah lama meluncurkan suatu fasilitas kredit konsumsi, yang berfungsi untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Pada saat ini banyak Bank serta lembaga pembiayaan yang gencar mengiming-imingi kredit konsumsi pada para konsumen. Pada dasarnya kredit konsumsi tidak selalu jelek, bahkan banyak yang bisa mendorong ekonomi keluarga menjadi lebih baik, asal dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Pada umumnya suku bunga kredit konsumsi lebih tinggi dibanding kredit produktif, bahkan ada yang *fixed rate*. Data dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa selama periode Januari 2007 hingga Desember 2007, posisi kredit konsumsi Bank Umum mengalami kenaikan sekitar 300 persen. Angka ini akan lebih besar lagi apabila besaran kredit konsumsi dari Bank Perkreditan Rakyat dan perusahaan pembiayaan juga diikutsertakan. Pada periode 2006-2007, proporsi kredit konsumsi yang disalurkan oleh Bank Umum rata-rata sebesar 27 persen. Kredit konsumsi menempati urutan kedua setelah kredit modal kerja, dengan proporsi sekitar 30 persen dari total kredit yang disalurkan oleh seluruh jenis bank di Indonesia. Kenaikan kredit konsumsi yang tidak terawasi dapat berakibat buruk terhadap perekonomian, terutama apabila pihak bank tidak mampu menilai dengan baik potensi atau kemampuan membayar dari seorang debitor.

Tabel 1

Posisi Pinjaman Kredit Konsumsi, Investasi dan Modal Kerja yang diberikan Bank Umum dan BPR di Propinsi Sulawesi Selatan

Jenis Kredit	2003	2004	2005	2006	2007
Kredit Konsumsi (Juta)	3,284,410	4,411,229	6,402,943	7,577,760	9,331,263
Kredit Investasi (Juta)	3,716,590	3,178,269	4,199,233	5,857,650	5,702,317
Kredit Modal Kerja (Juta)	3,296,200	4,695,315	5,653,782	6,931,151	9,244,448

Sumber : Statistik Keuangan Daerah Sulawesi Selatan Vol 8 No 1 2008 (Bank Indonesia)

Penyaluran kredit konsumsi hingga Desember 2007, menurut data Bank Indonesia, mencapai Rp 9,331 triliun. Tercatat Rp 9,331 triliun dari jumlah kredit disalurkan dalam bentuk rupiah dan Rp 241 Juta dalam mata uang negara lain. Jenis kredit konsumsi, antara lain, kredit pemilikan rumah, kredit tanpa agunan, kredit kendaraan bermotor, dan kartu kredit. Kredit konsumsi didominasi kredit kendaraan bermotor, kredit kepemilikan rumah dan kartu kredit.

Kenaikan kredit konsumsi yang tidak terawasi dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas keuangan (*financial stability*) Indonesia. Lebih jauh lagi, kredit konsumsi yang terlalu tinggi dapat menyebabkan inflasi, apabila sektor produksi tidak berjalan dengan baik. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi yang mengandalkan pertumbuhan konsumsi semata tidak menjamin sisi keberlanjutannya.

Dari sisi jenis kredit yang disalurkan, kredit konsumsi tercatat masih mendominasi dengan pangsa sebesar 38,42 % sementara sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) masih merupakan sektor penyerap kredit terbesar kedua dengan pangsa sebesar 38,01%, sedangkan Kredit Investasi mencapai 23.54% dari seluruh kredit yang disalurkan pada triwulan laporan 2007.

Dari sisi permintaan, Konsumsi mencatat pertumbuhan dari 7,66% pada triwulan pertama tahun 2004, lalu menjadi sebesar 8,36% pada triwulan terakhir tahun yang sama. pada tahun 2005 menjadi 11,39% pada triwulan laporan akhir tahun. Untuk konsumsi pemerintah, komponen terbesar yang mengalami peningkatan adalah belanja aparatur daerah, sedangkan belanja bantuan keuangan merupakan pos yang terendah realisasinya. Beberapa faktor penyebab pertumbuhan konsumsi rumah tangga, antara lain disebabkan oleh banyaknya lembaga-lembaga pembiayaan yang memberikan kemudahan dalam pemberian kredit konsumsi (Statistik Keuangan Daerah Sulsel, Vol 8 No 1 2008 Bank Indonesia).

Dengan mengacu pada latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian sejauh mana tingkat pendapatan masyarakat dan suku bunga mempengaruhi permintaan kredit konsumsi perbankan di Sulawesi Selatan tahun 1998-2007.

1.2. Rumusan Masalah`

Yang menjadi masalah pokok dalam penulisan ini adalah:

“ Seberapa besar tingkat pendapatan masyarakat dan suku bunga berpengaruh terhadap permintaan kredit konsumsi perbankan di Sulawesi Selatan tahun 1998-2007”.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1.3.1. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini adalah:

Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendapatan masyarakat dan suku bunga terhadap permintaan kredit konsumsi perbankan di Sul-Sel Periode 1998-2007.

1.3.2. Kegunaan Penulisan

Adapun kegunaan dari penulisan ini adalah:

1. Sebagai aplikasi ilmiah untuk mengetahui serta membuktikan teori-teori yang berkenaan dengan penulisan.
2. Sebagai bahan informasi atau referensi bagi pihak lain yang membutuhkan atau yang memiliki persamaan dari judul yang penulis angkat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perbankan

Perbankan adalah salah satu lembaga ekonomi yang tertua. Kita tidak tahu kapan pertama kali lahir atau kapan bank yang pertama itu diorganisir, tetapi kita tahu bahwa telah ada usaha-usaha perbankan dalam peradaban-peradaban komersial yang paling tua.

Bank berasal dari kata Italia *banco* yang artinya bangku. Bangku inilah yang dipergunakan oleh bankir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi Bank (Kasmir, 2000. **Manajemen Perbankan**).

Bank termasuk perusahaan industri jasa karena produknya hanya memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Agar pengertian bank menjadi jelas, penulis mengutip beberapa definisi atau rumusan yang dikemukakan oleh para penulis sebelumnya yaitu sebagai berikut :

2.1.1 Defenisi Bank

1. Undang-undang republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang telah diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 :
 - Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat

dalam bentuk kredit dan/bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.

- Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
- Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

(Kasmir. 2000. **Manajemen Perbankan**)

2. G.M Veryyn Stuart

"Bank is a company who satisfied other people by giving a credit with the money they accept as a gamble to the other, eventhough they should supply the new money". (Bank adalah badan usaha yang wujudnya memuaskan keperluan orang lain, dengan memberikan kredit berupa uang yang diterimanya dari orang lain, sekalipun dengan jalan mengeluarkan uang baru kertas atau logam). Jadi bank dalam hal ini telah melakukan operasi pasif dan aktif, yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat yang kelebihan dana (surplus spending unit-SSU) dan menyalurkan kredit

kepada masyarakat yang membutuhkan dana (defisit spending unit – DSU) (Hasibuan, 2006).

3. Malayu S.P Hasibuan

Bank umum adalah lembaga keuangan, pencipta uang, pengumpul dana dan penyalur kredit, pelaksana lalu lintas pembayaran, stabilisator moneter, serta dinamisator pertumbuhan perekonomian.

Bank adalah lembaga keuangan berarti bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (financial assets) serta bermotifkan profit dan juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja (Hasibuan, 2006).

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Bank umum adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana ke masyarakat.

2.1.2 Sumber dana Bank

Dana Bank ini hanya berasal dari dua sumber saja, yaitu dana sendiri dan dana asing.

1. Dana sendiri (dana Intern), yaitu dana yang bersumber dari dalam bank, seperti setoran modal/penjualan saham, pemupukan cadangan, laba yang ditahan dan lain-lain. Dana ini sifatnya tetap.
2. Dana Asing (Dana Ekstern), yaitu dana yang bersumber dari pihak ketiga, seperti deposito, giro, *call money*, dan lain-lain. Dana ini sifatnya sementara atau harus dikembalikan (Kasmir, 2002).

2.2 Kredit

2.2.1 Pengertian Kredit

Kredit berasal dari kata Latin, *credere* yang artinya kepercayaan, yaitu kepercayaan dari kreditor bahwa debitornya akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Tugasnya, kreditor percaya bahwa kredit itu tidak akan macet.

Prinsip penyaluran kredit adalah prinsip kepercayaan dan kehati-hatian. Indikator kepercayaan ini adalah kepercayaan moral, komersial, finansial, dan agunan. Kepercayaan dibedakan atas kepercayaan murni dan kepercayaan reserve.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan, yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan (UU RI No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan Bab I, pasal I, ayat (12)) (Suyatno, dkk. 1999).

2.2.2 Tujuan Kredit

Tujuan kredit terbagi atas tiga bagian yaitu :

- 1) Kredit konsumsi yaitu kredit yang dipergunakan untuk kebutuhan sendiri bersama keluarganya, seperti kredit rumah atau mobil yang akan digunakan sendiri bersama keluarganya. Kredit ini tidak produktif.
- 2) Kredit modal kerja (kredit perdagangan) ialah kredit yang akan dipergunakan untuk menambah modal usaha debitur. Kredit ini tidak produktif.

- 3) Kredit Investasi ialah kredit yang dipergunakan untuk investasi dalam bentuk menanam modal untuk mendapatkan keuntungan (fee) dari Investasi tersebut.

2.2.3 Fungsi Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan.

Adapun tujuan utama pemberian suatu kredit menurut Djumhana (1996:232), antara lain :

1. Mencari keuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit yang diberikan. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

Keuntungan ini penting untuk kelangsungan kegiatan bank. Jika bank yang terus-menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidir (dibubarkan)

2. Membantu usaha nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut maka pihak kreditur dapat mengembangkan dan memperbaiki usahanya.

3. Membantu Pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor.

Kemudian disamping tujuan diatas suatu fasilitas kredit memiliki fungsi (Suyatno, 1999:16), sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan daya guna uang.

Dengan adanya penyaluran kredit dapat meningkatkan daya guna uang maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit

2. Untuk meningkatkan peredaran uang dan lalu lintas uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

3. Untuk meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh bank dapat digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang semula tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

4. Meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu

wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar. Kredit untuk meningkatkan peredaran barang biasanya untuk kredit perdagangan atau kredit ekspor-impor

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan masyarakat. Kredit dapat pula membantu mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga dapat meningkatkan devisa negara.

6. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja, dapat pula mengurangi pengangguran. Di samping itu bagi masyarakat sekitar pabrik juga akan dapat memperoleh pendapatan berupa gaji bagi karyawan yang bekerja di pabrik dan membuka warung atau menyewa rumah kontrakan atau jasa lainnya bagi masyarakat yang tinggal disekitar lokasi pabrik.

7. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha.

Bagi debitur kredit yang diperoleh tentu dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi nasabah yang memang modalnya pas-pasan. Dengan memperoleh kredit nasabah bergairah untuk dapat memperbesar atau memperluas usahanya.

8. Untuk meningkatkan hubungan internasional.

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara debitur dan kreditur. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerjasama di bidang lainnya sehingga dapat pula tercipta perdamaian dunia

2.2.4 Jenis Kredit

Kredit yang diberikan baik oleh bank umum maupun bank perkreditan rakyat terdiri dari berbagai jenis. Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat sebagai berikut ;

I. Dilihat dari segi kegunaannya

Atas dasar tujuan penggunaan dananya oleh membedakan kredit menjadi 2 jenis yaitu :

a. Kredit Modal Kerja (KMK)

Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam kegiatan operasional nasabah. Sebagai contoh, apabila nasabah bergerak dalam bidang perdagangan sembako, KMK dapat digunakan untuk pembelian sembako, honor supir truk, tagihan listrik kantor, dan lain-lain. KMK biasanya berjangka pendek dan disesuaikan dengan jangka waktu perputaran modal kerja nasabah.

b. Kredit investasi (KI)

Kredit Investasi adalah kredit yang digunakan untuk pengadaan barang modal jangka panjang untuk kegiatan usaha nasabah. Apabila nasabah bergerak dalam bidang perdagangan sembako misalnya, KI dapat digunakan untuk



pembelian tanah dan bangunan untuk kantor, komputer untuk kantor, truk pengangkut sembako, dan lain-lain. Kredit investasi biasanya berjangka menengah atau panjang, karena nilainya yang relatif besar dan cara pelunasan oleh nasabah melalui angsuran.

Selain berdasarkan kegunaannya jenis-jenis kredit juga dapat digolongkan berdasarkan dari segi tujuan jangka waktu, jaminan dan sektor usaha seperti yang dikemukakan oleh Kasmir (2002), berikut penjelasannya :

2. Kredit Dilihat Dari Segi Tujuan Kreditnya

a. Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Sebagai contohnya kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang dan kredit pertanian, kredit pertambangan menghasilkan barang tambang atau kredit industri akan menghasilkan barang-barang industri.

b. Kredit Perdagangan.

Kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangannya seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan oleh supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. Contoh kredit ekspor dan impor.

c. Kredit Konsumsi

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang atau jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Sebagai contoh kredit untuk perumahan kredit dan modal pribadi, kredit perabotan rumah tangga dan kredit konsumsi lainnya.

3. Kredit Dilihat Dari Sudut Jangka Waktunya

a. Kredit Jangka Pendek (*Short Term Loan*)

Kredit Jangka Pendek (*Short Term Loan*), yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b. Kredit Jangka Menengah (*Medium Term Loan*)

Kredit Jangka Menengah (*Medium Term Loan*), yakni kredit yang berjangka waktu antara 1 sampai 3 tahun, kecuali kredit untuk tanaman musiman sebagaimana tersebut di atas. Kredit modal kerja dapat diberikan oleh bank untuk membiayai kegiatan-kegiatannya, misalnya untuk membeli bahan baku, upah buruh, dan suku cadang (*spare parts*), dan lain-lain.

c. Kredit Jangka Panjang (*Long Term Loan*)

Kredit Jangka Panjang (*Long Term Loan*), yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun. Kredit jangka panjang ini pada umumnya adalah kredit investasi yang bertujuan menambah modal perusahaan dalam

rangka untuk melakukan rehabilitasi, ekspansi (perluasan), dan pendirian proyek baru.

3. Kredit dilihat dari segi jaminan

- a. Kredit dengan jaminan : merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur.
- b. Kredit tanpa jaminan : merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas si calon debitur selama berhubungan dengan bank bersangkutan.

4. Kredit dari segi sektor usaha

- a. Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.
- b. Kredit industri, yaitu untuk membiayai industri pengolahan baik untuk industri kecil, menengah maupun besar.
- c. Kredit pendidikan, merupakan jenis kredit yang diberikan untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa yang sedang belajar.
- d. Kredit profesi, diberikan kepada kalangan para profesional seperti, dosen, dokter atau pengacara.

- e. Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.
 - f. Dan sektor-sektor lainnya
- (Suyatno, Thomas, dkk. 1999)

Dari penjelasan jenis-jenis kredit di atas, pada dasarnya pemberian jenis-jenis kredit kepada masyarakat untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu sesuai kebutuhan.

2.3 Konsumsi

Menurut Mankiw (2003) “Konsumsi adalah barang atau jasa yang dibeli oleh rumah tangga. Konsumsi terdiri dari barang tidak tahan lama (*Non Durable Goods*), adalah barang yang habis dipakai dalam waktu pendek, seperti makanan dan pakaian. Kedua adalah barang tahan lama (*Durable Goods*) adalah barang yang memiliki usia panjang seperti mobil, televisi, alat-alat elektronik, ponsel dan lainnya. Ketiga, jasa (*Services*) meliputi pekerjaan yang dilakukan untuk konsumen oleh individu dan perusahaan seperti potong rambut dan berobat ke dokter”.

Menurut Samuelson & Nordhaus (1996) “Konsumsi adalah pengeluaran untuk pembelian barang-barang dan jasa akhir guna mendapatkan kepuasan ataupun memenuhi kebutuhannya”.

Menurut Masliah (2002), dalam penelitiannya “Hubungan antara konsumsi dan pendapatan nasional sendiri saling berhubungan. Hal ini didasarkan kondisi yang terjadi bahwa konsumsi tergantung pada persepsi masyarakat terhadap

pendapatan permanen (pendapatan masyarakat selama hidupnya) dari pada pendapatan yang dibelanjakan yang mereka peroleh pada saat ini. Dalam kondisi ekonomi mengalami kemajuan, konsumsi akan cenderung tertinggal oleh naiknya tingkat pendapatan sementara pada masa ekonomi mengalami kemunduran, tingkat konsumsi tidak akan turun secepat tingkat pertumbuhan pendapatan”.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan mempunyai peranan penting dalam mempengaruhi pengeluaran konsumsi masyarakat, baik itu untuk konsumsi barang tidak tahan lama, barang tahan lama, dan jasa.

2.3.1 Konsumsi rumah tangga

Yang dimaksud dengan pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah nilai pembelanjaan yang dilakukan oleh rumah tangga untuk membeli berbagai jenis kebutuhannya dalam satu tahun tertentu. Dalam analisis makro ekonomi lebih lazim disebut konsumsi rumah tangga. Menurut Sukirno (2000): “Pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah nilai belanja yang dilakukan oleh rumah tangga untuk membeli berbagai jenis kebutuhannya dalam satu tahun tertentu. Pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan untuk membeli makanan, pakaian, biaya jasa pengangkutan, membayar pendidikan anak, membayar sewa rumah dan membeli kendaraan. Barang-barang tersebut dibeli rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya”.

Keputusan konsumsi rumah tangga dipengaruhi keseluruhan perilaku baik jangka panjang maupun jangka pendek. Keputusan konsumsi rumah tangga untuk jangka panjang adalah penting, karena peranannya dalam pertumbuhan ekonomi.

Sedangkan untuk analisa jangka pendek peranannya juga penting dalam menentukan permintaan aggregate. Seperti yang telah dijelaskan bahwa semakin tinggi pendapatan maka semakin besar pula konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga, namun pertambahan konsumsi yang terjadi, lebih rendah dari pada pertambahan pendapatan yang berlaku.

Akan tetapi, pada tingkat pendapatan yang sangat rendah, bisa saja seluruh pendapatan digunakan untuk konsumsi sehingga tabungan adalah nol. Bahkan terpaksa konsumsi dibiayai dari kekayaan atau pendapatan masa lalu. Kondisi ini disebut dissaving atau mengorek tabungan.

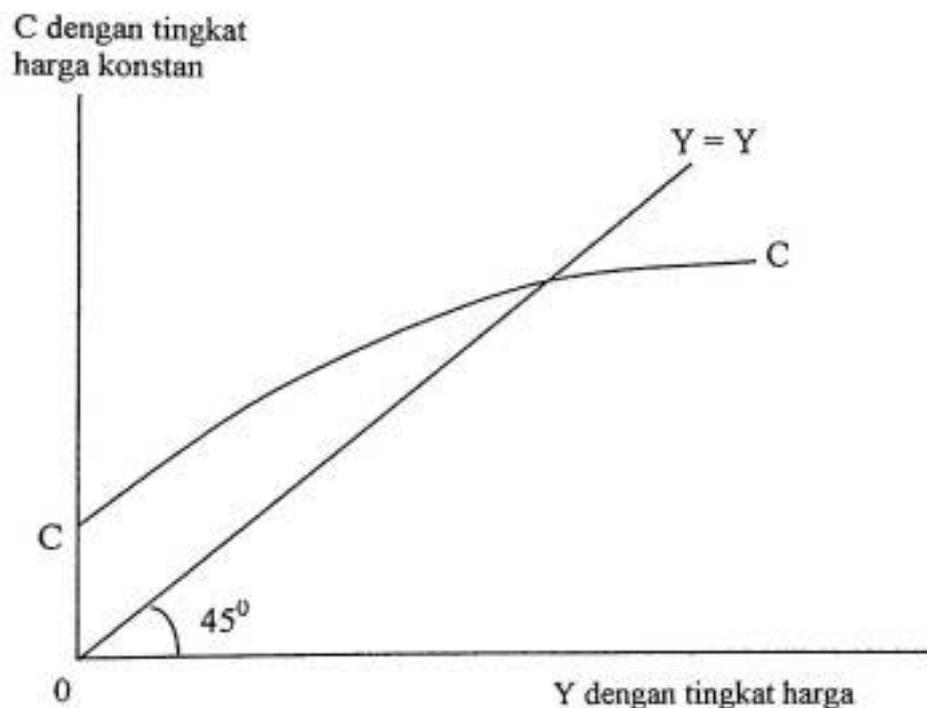
2.3.2 Fungsi Konsumsi Menurut Keynes

Secara singkat disajikan beberapa catatan mengenai fungsi konsumsi Keynes:

1. *Variable nyata*. Yang dimaksud ialah bahwa fungsi konsumsi Keynes menunjukkan hubungan antara pendapatan nasional dengan pengeluaran konsumsi yang kedua-duanya dinyatakan dengan menggunakan tingkat harga konstan. Jadi bukannya hubungan antara pendapatan nasional nominal dengan pengeluaran konsumsi nominal.
2. *Pendapatan yang terjadi*. Dalam literature banyak disebutkan bahwa yang menentukan besar kecilnya pengeluaran konsumsi adalah pendapatan nasional yang terjadi atau *current national income*. Penekanan ini sekedar untuk menunjukkan bahwa yang dimaksud Keynes bukannya pendapatan yang terjadi sebelumnya, bukan pula pendapatan yang diramalkan akan terjadi di

masa datang atau konsepsi-konsepsi pendapatan nasional lain-lainnya yang ternyata oleh para pemikir sesudahnya dianggap atau bahkan diketemukan sangat besar peranannya terhadap pengeluaran konsumsi masyarakat.

3. *Pendapatan absolute*. Dalam Fungsi konsumsi Keynes variable pendapatan nasionalnya perlu diinterpretasikan sebagai pendapatan nasional absolute.



Gambar 1
Fungsi Konsumsi Menurut Keynes

4. *Bentuk fungsi Konsumsi*. Keynes berpendapat bahwa fungsi konsumsi berbentuk lengkung, yaitu seperti tergambar pada gambar diatas sebagai kurva CC. Selanjutnya 2 hal yang perlu diperhatikan, yakni:

- Fungsi konsumsi menurut Keynes tidak melalui titik silang sumbu 0, melainkan memotong sumbu vertikal pada nilai C_0 yang positif. Ini membawa konsekuensi bahwa baik dalam hal fungsi konsumsi berbentuk

garis lurus ataupun berbentuk garis lengkung seperti yang diasumsikan oleh Keynes, meningkatnya pendapatan nasional mengakibatkan nilai APC menurun, dan berlaku pula $MPC < APC$.

- Fungsi konsumsi berbentuk lengkung dengan nilai MPC menurun dengan meningkatnya pendapatan nasional.

Sumber (Sukirno, Sadono, 2000)

2.4 PENDAPATAN

2.4.1 Pendapatan

Dalam beberapa definisi, sering dijumpai pengertian pendapatan yang didentikkan dengan penerimaan. Namun antara pengertian pendapatan dan penerimaan keduanya mempunyai arti yang berbeda, sebagaimana yang dikemukakan oleh Wiryohasmono (1982) yang menjelaskan bahwa pendapatan adalah keseluruhan penghasilan yang diterima dari suatu usaha atau kegiatan tertentu sedangkan penerimaan adalah setiap hasil yang diterima dari suatu usaha atau kegiatan tertentu.

Definisi pendapatan adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi-organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba, bersama juga dengan bantuan, tunjangan pengangguran, pensiun, usia lanjut, dan lain-lain.

2.4.2 Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita merupakan bagian dari pendapatan nasional dan merupakan salah satu faktor indikator pembangunan, pendapatan perkapita selain bisa memberikan gambaran tentang laju pertumbuhan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu juga dapat menggambarkan perubahan corak perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat yang terjadi di berbagai daerah.

Pendapatan perkapita diperoleh dari membagi jumlah pendapatan nasional bruto/pendapatan domestik bruto pada satu tahun tertentu dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut. Menurut Sadono Sukirno (2000). Dalam hal ini pendapatan per kapita yang digunakan adalah pendapatan per kapita regional dimana pendapatan per kapita regional adalah total pendapatan suatu daerah dibagi jumlah penduduk di daerah tersebut untuk tahun yang sama. Angka yang digunakan semestinya adalah total pendapatan regional dibagi dengan jumlah penduduk regional dibagi jumlah penduduk. Akan tetapi, angka ini seringkali tidak diperoleh sehingga diganti dengan total PDRB atas dasar harga pasar dibagi dengan jumlah penduduk. Angka pendapatan per kapita dapat dinyatakan dalam harga berlaku maupun dalam harga konstan tergantung kebutuhan (Robinson Tarigan 2005).

Pendapatan per kapita atas dasar harga Konstan = $\frac{\text{PDRB Harga Konstan}}{\text{Jumlah Penduduk}}$

2.5 Tingkat Suku Bunga

Menurut Samuelson (2004(17th Edition)) “*Suku bunga adalah pembayaran yang dilakukan untuk penggunaan uang. Suku bunga adalah jumlah yang dibayar per unit waktu. Oleh karena itu masyarakat harus membayar peluang untuk meminjam uang. Biaya untuk meminjam uang diukur dalam Dollar per tahun untuk setiap Dollar yang dipinjamkan adalah suku bunga*”.

Mankiw (2000) “*tingkat bunga adalah harga pasar yang mentransfer sumber daya masa lalu dan masa depan atau hasil tabungan dan biaya peminjaman*”.

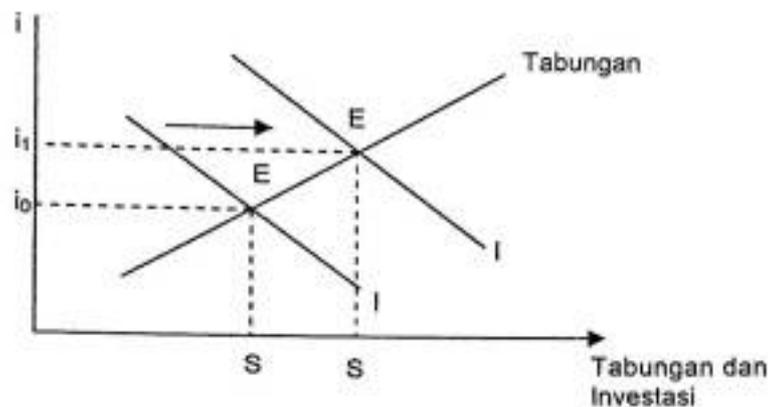
Para ekonom menyebutkan tingkat bunga yang dibayar bank sebagai tingkat bunga nominal (*nominal interest rate*) dan kenaikan dalam daya beli dengan tingkat bunga riil (*real interest rate*). Tingkat bunga nominal adalah hasil tabungan dan biaya peminjaman tanpa penyesuaian terhadap inflasi sedangkan tingkat bunga riil adalah pengembalian terhadap tabungan dan biaya peminjaman setelah disesuaikan dengan inflasi (Mankiw, 2000).

2.5.1 Tingkat Bunga menurut Teori Klasik

Beranjak dari teori ekonomi mikro, teori klasik mengatakan bahwa tingkat bunga merupakan nilai balas jasa dari modal. Dalam teori klasik, stok barang modal dicampuradukkan dengan uang dan keduanya dianggap mempunyai hubungan substitutif. Semakin langka modal, semakin tinggi suku bunga. Sebaliknya, semakin banyak modal semakin rendah tingkat suku bunga, (Anwar Nasution dalam Badriah Sappewali, 2001)

Gambar II

Tingkat Bunga Menurut Teori Klasik



Sumber : Nopirin (1993)

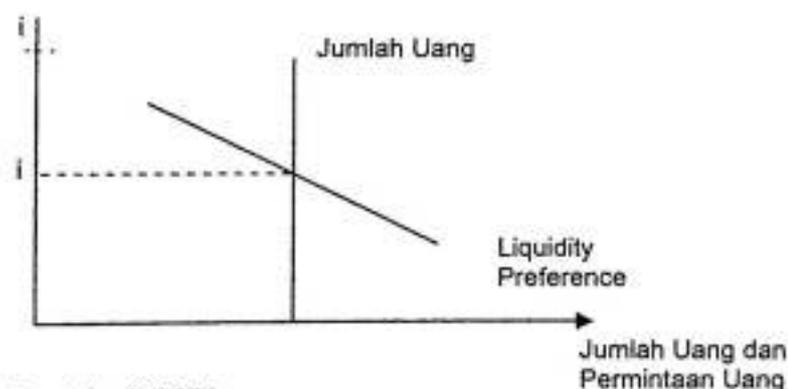
Keseimbangan tingkat bunga berada pada titik i_0 dimana jumlah tabungan sama dengan jumlah investasi. Apabila tingkat bunga berada diatas i_0 , berarti jumlah tabungan melebihi keinginan pengusaha untuk melakukan investasi. Para pemilik dana akan bersaing untuk meminjamkan dananya dan persaingan ini akan menekan tingkat bunga turun kembali ke posisi i_0 . sebaliknya, bila tingkat bunga rendah berada di bawah i_0 , maka para pengusaha akan bersaing untuk mendapatkan dana yang relatif lebih besar jumlahnya. Persaingan ini akan mendorong tingkat bunga naik lagi ke i_0 . Misalnya terjadi kenaikan efisiensi produksi, maka akan mengakibatkan keuntungan yang diharapkan meningkat sehingga pada tingkat bunga yang sama para pengusaha bersedia membayar dana yang lebih besar untuk membiayai investasi, atau untuk dana investasi yang sama jumlahnya, para pengusaha bersedia membayar tingkat bunga yang lebih tinggi. Keadaan ini ditunjukkan dengan tergesernya kurva permintaan investasi ke kanan atas, sehingga keseimbangan tingkat bunga yang baru adalah pada titik i_1 (Nopirin, 1993)

2.5.2 Tingkat Bunga menurut Keynes

Dalam teori Keynes diasumsikan bahwa perekonomian belum mencapai tingkat *full employment*. Oleh karena itu, produksi masih dapat ditingkatkan tanpa mengubah tingkat upah maupun tingkat harga. Dengan menurunkan tingkat bunga, investasi dan konsumsi dapat dirangsang untuk meningkatkan produksi nasional. Dengan demikian setidaknya untuk jangka pendek, kebijaksanaan moneter dalam teori Keynes berperan untuk meningkatkan produksi nasional.

Gambar III

Tingkat Bunga menurut Keynes



Sumber : Nopirin (1993)

Dalam Gambar III, sumbu vertikal menggambarkan tingkat bunga dan sumbu horizontal menggambarkan jumlah dan permintaan uang. Permintaan akan uang mempunyai hubungan negatif dengan tingkat bunga. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, Keynes menyatakan bahwa masyarakat mempunyai keyakinan bahwa ada suatu tingkat bunga yang normal. Jika memegang surat berharga pada waktu tingkat bunga naik (harga turun) mereka akan menderita kerugian. Mereka

akan menghindari kerugian ini dengan cara mengurangi surat berharga yang dipegangnya dan dengan sendirinya menambah uang yang dipegang.

Kedua, sehubungan dengan biaya memegang uang kas. Makin tinggi tingkat bunga, makin besar pula biaya memegang uang kas, sehingga keinginan memegang uang kas juga semakin rendah sehingga permintaan akan uang kas naik. Dari kedua penjelasan diatas, dijelaskan adanya hubungan negatif antara tingkat bunga dengan permintaan akan uang tunai. Permintaan uang ini akan menentukan tingkat bunga. Tingkat bunga berada dalam keseimbangan apabila jumlah uang kas yang diminta sama dengan penawarannya (Nopirin, 1993).

2.6 Teory Money Demand

Ada tiga motif yang mendasari permintaan uang menurut teori Keynes dalam Samuelson 2004, yaitu:

1) Motif transaksi (*transaction motive*)

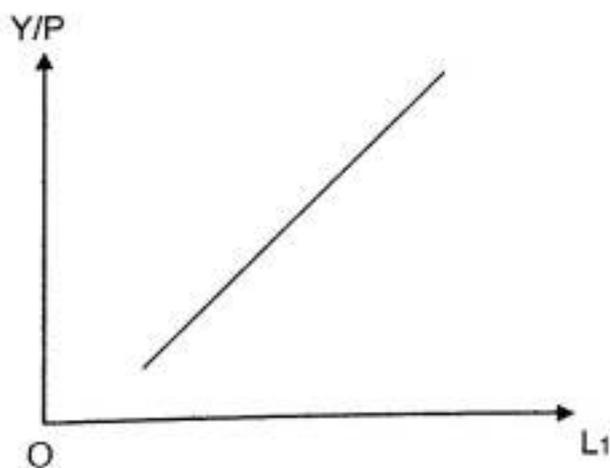
Permintaan dari individu atau perusahaan terhadap saldo uang untuk membiayai pengeluaran sehari-hari di antara periode penerimaan pendapatan. Besarnya uang untuk keperluan transaksi tergantung pada besarnya pendapatan.

$$M T = f(Y)$$

Gambar IV

Dimana : MT = permintaan uang untuk keperluan transaksi

Y = pendapatan



2) Motif spekulasi (*speculative motive*)

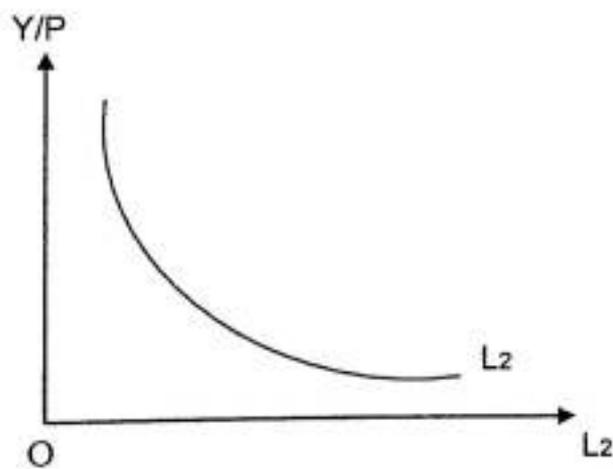
Permintaan untuk sejumlah uang dalam bentuk likuid yang sangat tinggi, dengan harapan untuk memperoleh keuntungan dari persetujuan-persetujuan dalam bentuk obligasi atau aktiva riil yang berharga rendah. Besarnya uang untuk keperluan ini tergantung kepada besarnya tingkat bunga.

$$M S = f(r)$$

Dimana : MT = permintaan uang untuk keperluan spekulasi

r = tingkat bunga

Gambar V



3) Motif berjaga-jaga (*precautionary motive*)

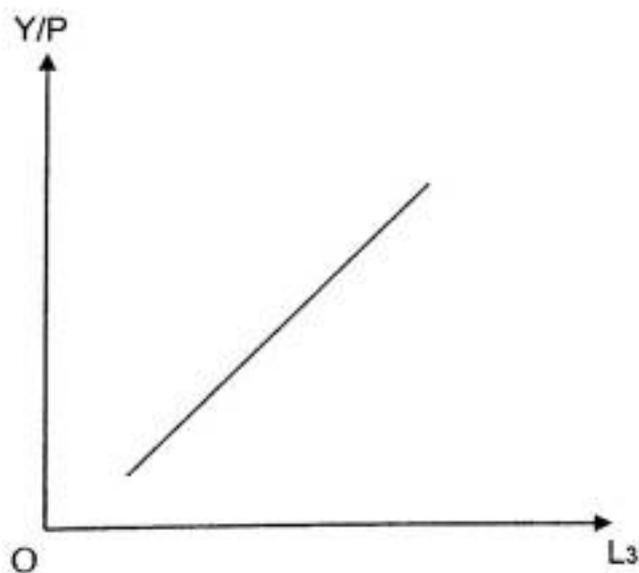
Permintaan terhadap saldo uang yang dipegang untuk menutup kemungkinan-kemungkinan yang tidak terduga di masa datang.

$$MP = f(Y)$$

Dimana : MT = permintaan uang untuk berjaga-jaga

Y = pendapatan

Gambar VI



2.7 Studi Empirik

Asriyanti (2003) Dalam penelitian mengenai Pengaruh Pendapatan Per Kapita, Tingkat Suku Bunga, Inflasi dan Tenaga Kerja Terhadap Konsumsi Non Makanan Di Sulawesi Selatan Tahun 1990-2000. Dimana dalam hal ini membahas bagaimana pengaruh pendapatan per kapita, tingkat suku bunga, inflasi dan tenaga kerja mempengaruhi Konsumsi Non Makanan di Sulawesi Selatan.

Sukmawati (2001) Pengaruh Kredit Perbankan Terhadap PDRB di Sulawesi Selatan (1983-1998). Studi ini membahas bagaimana pengaruh Kredit perbankan, baik itu kredit Investasi, Modal Kerja dan Konsumsi mempengaruhi pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi-Selatan dengan PDRB sebagai tolak ukurnya.

Pada perkembangannya, studi-studi empiris mengenai permintaan kredit konsumsi dilakukan dengan mengamati data yang sifatnya jauh lebih terperinci (mikro) antara lain : kelompok variabel yang mewakili pendapatan, kekayaan dan karakteristik kestabilan pendapatan rumah tangga; kelompok variabel yang mewakili karakteristik demografi; dan kelompok variabel yang mewakili karakteristik jasa perbankan di lokasi tempat rumah tangga berada. Dengan menggunakan data yang bersifat lebih mikro, maka faktor-faktor yang berpengaruh dalam menentukan besarnya permintaan kredit konsumsi di level unit analisis yang lebih rendah dapat diidentifikasi.

Beberapa penelitian empiris mengenai kredit konsumsi dengan menggunakan data di level mikro tersebut antara lain telah dilakukan oleh Cox dan Japelli (1993),

Duca dan Rosental (1993), Crook (2001), Barnes dan Young (2003) untuk kasus Amerika Serikat; Magri (2002) untuk kasus Italia; dan Brown et.al. (2003) untuk kasus Inggris. Masing-masing penelitian tersebut pada dasarnya melakukan estimasi atas karakteristik yang kurang lebih sama, hanya saja dilakukan dengan memberikan penekanan yang berbeda dalam issue yang di analisis. Dalam model ekonometrikanya, Cox dan Japelli menggunakan variabel boneka-laten yang hanya dapat terobservasi jika permintaan kredit konsumsi adalah positif dan rumah tangga tidak memiliki kendala kredit (Cox dan Japelli, 1993, hal. 201). Sedangkan variabel independen dalam model Cox dan Japelli (1993) adalah usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, pendapatan daerah (*area income*), status pekerjaan, dan status tempat tinggal (*urban/rural status*).

Hasil penelitian Cox dan Japelli (1993) memperlihatkan bahwa jika kendala kredit berhasil dihilangkan, maka tingkat kewajiban rumah tangga (*household liabilities*) dapat meningkat hingga 9 persen (Cox dan Japelli, 1993, hal. 209). Sekalipun demikian, kendala likuiditas sangat mempengaruhi 4 perilaku pinjaman dari rumah tangga yang menolak akses terhadap pasar kredit (Cox dan Japelli, 1993, hal. 209). Lebih jauh lagi, jika kendala kredit dapat dihilangkan, maka akan dapat meningkatkan *liabilities* dari kelompok ini hingga 75 persen (Cox dan Japelli, 1993, hal. 209). Crook (2001) melakukan penelitian dengan menggunakan data yang serupa untuk tahun yang berbeda (1995). Hasil penelitian Crook (2001) menunjukkan konsistensi dengan penelitian sebelumnya.

Penekanan Crook adalah pada golongan rumah tangga dengan penghasilan rendah dan menengah. Crook juga menemukan bahwa variabel penjelas yang bersifat

Duca dan Rosental (1993), Crook (2001), Barnes dan Young (2003) untuk kasus Amerika Serikat; Magri (2002) untuk kasus Italia; dan Brown et.al. (2003) untuk kasus Inggris. Masing-masing penelitian tersebut pada dasarnya melakukan estimasi atas karakteristik yang kurang lebih sama, hanya saja dilakukan dengan memberikan penekanan yang berbeda dalam issue yang di analisis. Dalam model ekonometrikanya, Cox dan Japelli menggunakan variabel boneka-laten yang hanya dapat terobservasi jika permintaan kredit konsumsi adalah positif dan rumah tangga tidak memiliki kendala kredit (Cox dan Japelli, 1993, hal. 201). Sedangkan variabel independen dalam model Cox dan Japelli (1993) adalah usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, pendapatan daerah (*area income*), status pekerjaan, dan status tempat tinggal (*urban/rural status*).

Hasil penelitian Cox dan Japelli (1993) memperlihatkan bahwa jika kendala kredit berhasil dihilangkan, maka tingkat kewajiban rumah tangga (*household liabilities*) dapat meningkat hingga 9 persen (Cox dan Japelli, 1993, hal. 209). Sekalipun demikian, kendala likuiditas sangat mempengaruhi 4 perilaku pinjaman dari rumah tangga yang menolak akses terhadap pasar kredit (Cox dan Japelli, 1993, hal. 209). Lebih jauh lagi, jika kendala kredit dapat dihilangkan, maka akan dapat meningkatkan *liabilities* dari kelompok ini hingga 75 persen (Cox dan Japelli, 1993, hal. 209). Crook (2001) melakukan penelitian dengan menggunakan data yang serupa untuk tahun yang berbeda (1995). Hasil penelitian Crook (2001) menunjukkan konsistensi dengan penelitian sebelumnya.

Penekanan Crook adalah pada golongan rumah tangga dengan penghasilan rendah dan menengah. Crook juga menemukan bahwa variabel penjelas yang bersifat

etnis ikut secara signifikan menentukan apakah rumah tangga memiliki kendala kredit (Crook, 2001, hal. 90 – 91). Selanjutnya, Magri (2002), dengan menggunakan data Survei Kekayaan dan Pendapatan di Italia, melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi rumah tangga di pasar kredit dan mencoba untuk memisahkan pengaruh permintaan dan penawaran kredit. Dalam model ekonometriknya, Magri menggolongkan usia, kekayaan netto, kapasitas pendapatan (*earning capacity*), pendidikan, dan tingkat suku bunga sebagai variabel-variabel yang dapat mempengaruhi permintaan maupun penawaran kredit konsumsi di Italia (Magri, 2002, hal. 17 – 18).

Hasil penelitian Magri menunjukkan bahwa permintaan kredit oleh rumah tangga di Italia meningkat seiring dengan meningkatnya usia (Magri, 2002, hal. 22). Di samping itu, *disposable income* juga memiliki pengaruh positif terhadap permintaan maupun penawaran kredit (Magri, 2002, hal. 23). Namun, variabel *net wealth* atau kekayaan netto tidak begitu signifikan dalam menjelaskan permintaan terhadap kredit (Magri, 2002, hal. 23).

Faktor lainnya yang penting dalam menjelaskan permintaan dan penawaran kredit adalah pendidikan, sebagai variabel yang menjadi *proxy* pendapatan di masa yang akan datang, di mana faktor tersebut berhubungan positif dengan permintaan kredit (Magri, 2002, hal. 24).

Dari tinjauan literatur di atas, upaya awal yang perlu dilakukan dalam penelitian kredit konsumsi di Indonesia adalah mengembangkan model turunan dari sistem permintaan dan penawaran kredit konsumsi yang sesuai untuk kasus di Indonesia.

etnis ikut secara signifikan menentukan apakah rumah tangga memiliki kendala kredit (Crook, 2001, hal. 90 – 91). Selanjutnya, Magri (2002), dengan menggunakan data Survei Kekayaan dan Pendapatan di Italia, melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi rumah tangga di pasar kredit dan mencoba untuk memisahkan pengaruh permintaan dan penawaran kredit. Dalam model ekonometriknya, Magri menggolongkan usia, kekayaan netto, kapasitas pendapatan (*earning capacity*), pendidikan, dan tingkat suku bunga sebagai variabel-variabel yang dapat mempengaruhi permintaan maupun penawaran kredit konsumsi di Italia (Magri, 2002, hal. 17 – 18).

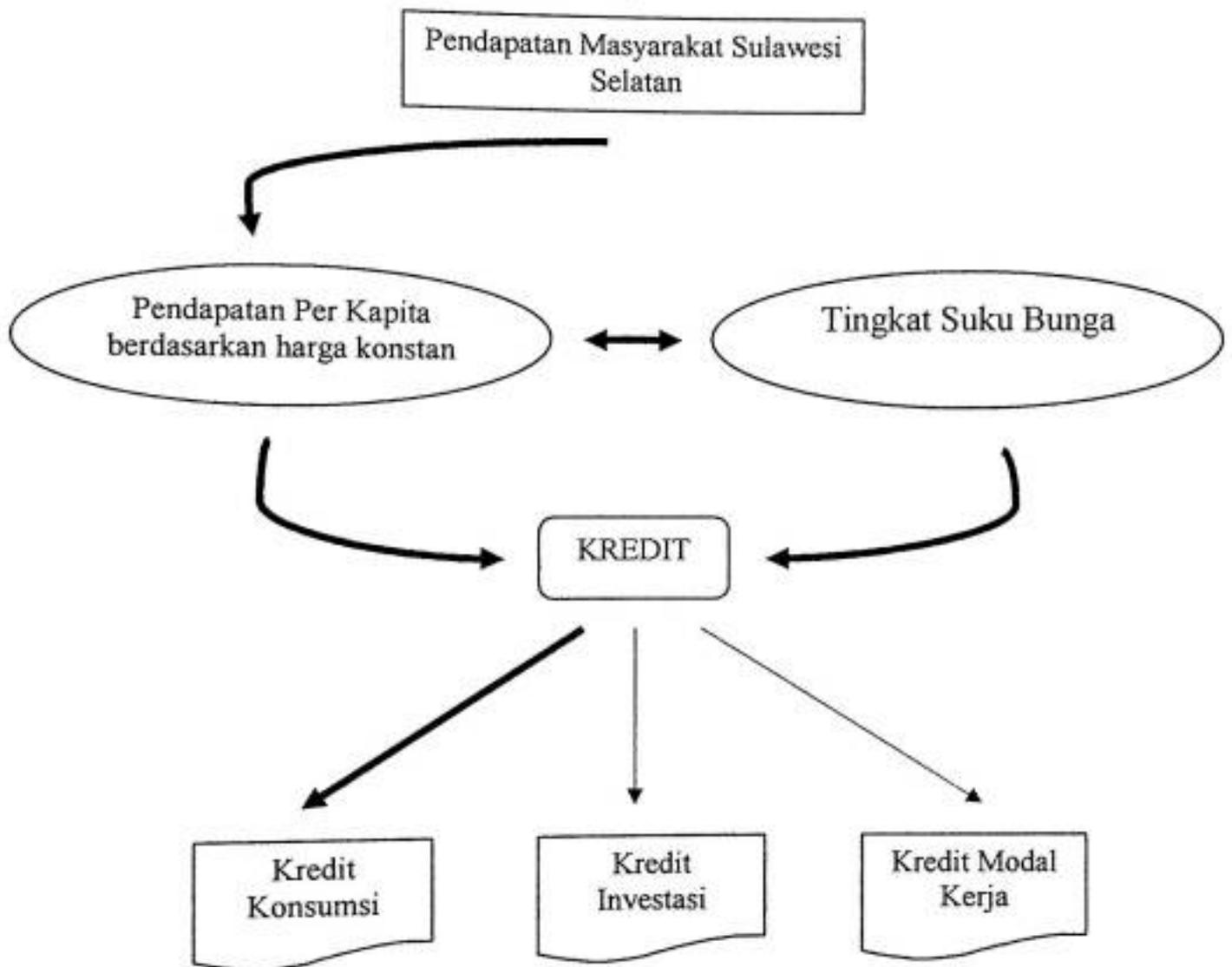
Hasil penelitian Magri menunjukkan bahwa permintaan kredit oleh rumah tangga di Italia meningkat seiring dengan meningkatnya usia (Magri, 2002, hal. 22). Di samping itu, *disposable income* juga memiliki pengaruh positif terhadap permintaan maupun penawaran kredit (Magri, 2002, hal. 23). Namun, variabel *net wealth* atau kekayaan netto tidak begitu signifikan dalam menjelaskan permintaan terhadap kredit (Magri, 2002, hal. 23).

Faktor lainnya yang penting dalam menjelaskan permintaan dan penawaran kredit adalah pendidikan, sebagai variabel yang menjadi *proxy* pendapatan di masa yang akan datang, di mana faktor tersebut berhubungan positif dengan permintaan kredit (Magri, 2002, hal. 24).

Dari tinjauan literatur di atas, upaya awal yang perlu dilakukan dalam penelitian kredit konsumsi di Indonesia adalah mengembangkan model turunan dari sistem permintaan dan penawaran kredit konsumsi yang sesuai untuk kasus di Indonesia.

2.8 Kerangka Berpikir

Berdasarkan bahasan teoritik yang telah dikemukakan sebelumnya, maka kerangka berpikir dari usulan penelitian ini yaitu :



KET : **—————>** : Variabel yang dianalisis

—————> : Variabel yang tidak dianalisis

2.9 Hipotesis

Untuk memecahkan masalah dan menganalisis lebih lanjut terhadap masalah yang dikemukakan di atas maka diambil suatu hipotesis sebagai pedoman. Adapun rumusan hipotesis dalam penulisan ini yaitu:

“ Tingkat pendapatan masyarakat berpengaruh positif terhadap permintaan kredit konsumsi sedangkan tingkat suku bunga kredit berpengaruh negative terhadap permintaan kredit konsumsi di Sulawesi-Selatan periode 1998-2007”

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

3.1.1 Daerah Penelitian

Penulis dalam menyusun penulisan ini melakukan penelitian di Sulawesi Selatan khususnya pada BPS (Badan Pusat Statistik) Sulawesi Selatan.

3.1.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu :

1. Studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu teknik pengumpulan data dari berbagai literatur guna memperoleh peralatan dasar teori-teori seperti buku-buku, majalah-majalah, jurnal-jurnal, buletin-buletin serta bacaan lain yang relevan dengan masalah yang diteliti.
2. Studi lapang objek (*Field Research*), yaitu pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti dengan penelitian lapangan maksudnya adalah melakukan penelitian dan pencatatan di instansi yang memiliki informasi dan data-data sekunder, menyangkut masalah pokok, yang diperlukan dalam penelitian ini.

3.2 Jenis dan Sumber data

3.2.1 Jenis data

Jenis data yang digunakan untuk membuktikan hipotesa adalah dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari dua jenis data, yaitu:

1. Data Kuantitatif, adalah data dari tahun 1998-2007 tentang data kredit konsumsi yang dikeluarkan perbankan, dan data tentang tingkat pendapatan per kapita dalam hal ini masyarakat di Sulawesi Selatan.
2. Data Kualitatif, adalah hasil studi kepustakaan, artikel maupun referensi yang berhubungan dengan penulisan dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam penulisan.

3.2.2 Sumber Data

Sumber data adalah dengan melalui:

1. Studi dokumentasi untuk memperoleh data sekunder yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung pada lembaga resmi yang menerbitkan data sekunder dalam hal ini adalah Bank Indonesia dan BPS kota Makassar.
2. Penelitian Kepustakaan, yaitu berupa informasi dan literatur yang berhubungan dengan kredit konsumsi dan tingkat pendapatan masyarakat Sulawesi Selatan.

3.2 Jenis dan Sumber data

3.2.1 Jenis data

Jenis data yang digunakan untuk membuktikan hipotesa adalah dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari dua jenis data, yaitu:

1. Data Kuantitatif, adalah data dari tahun 1998-2007 tentang data kredit konsumsi yang dikeluarkan perbankan, dan data tentang tingkat pendapatan per kapita dalam hal ini masyarakat di Sulawesi Selatan.
2. Data Kualitatif, adalah hasil studi kepustakaan, artikel maupun referensi yang berhubungan dengan penulisan dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam penulisan.

3.2.2 Sumber Data

Sumber data adalah dengan melalui:

1. Studi dokumentasi untuk memperoleh data sekunder yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung pada lembaga resmi yang menerbitkan data sekunder dalam hal ini adalah Bank Indonesia dan BPS kota Makassar.
2. Penelitian Kepustakaan, yaitu berupa informasi dan literatur yang berhubungan dengan kredit konsumsi dan tingkat pendapatan masyarakat Sulawesi Selatan.

3.3 Model Analisis

Model analisis yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan ini adalah Model analisis regresi linier majemuk (multiple regression). Untuk memperlihatkan hubungan antara variabel bebas dan tingkat suku bunga kredit terhadap variabel terikat yaitu kredit konsumsi perbankan.

$$C = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e \dots\dots\dots(1)$$

Dimana :

- C** : Kredit Konsumsi
- a** : Konstanta
- X₁** : Pendapatan Per Kapita
- X₂** : Tingkat Bunga
- b₁, b₂** : Parameter / koefisien regresi
- e** : Error Term

Berdasarkan model diatas, untuk mengetahui signifikansi antara variabel dependent dan variabel independent, digunakan perhitungan regresi untuk mendapatkan nilai-nilai sebagai berikut :

a. Uji Statistik t

Untuk menguji tingkat signifikansi antar variabel bebas dengan variabel terikat secara individu, maka digunakan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ atau 0,05.

b. Uji Statistik R² (koefisien determinasi)

Untuk mengukur besarnya proporsi/ sumbangan variabel bebas terhadap naik turunnya variabel terikat. Semakin besar nilai R^2 , maka semakin besar pula pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

c. *Uji F*

Untuk menguji hubungan antara variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ atau 0,05.

d. *Scatter Plot*

Untuk menjelaskan hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas dengan menggunakan diagram.

3.4 Batasan Variabel

1. Kredit Konsumsi

Adalah tingkat permintaan kredit konsumsi perbankan di Sulawesi Selatan tahun 1998-2007.

2. Pendapatan Perkapita

Adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Konstan yang dibagi dengan jumlah penduduk masyarakat daerah Sulawesi-Selatan tahun 1998-2007.

3. Tingkat Bunga

Adalah jumlah tertentu bunga yang harus dibayarkan peminjam kepada pemberi pinjaman atas sejumlah uang tertentu untuk membiayai konsumsi dan investasi. Tingkat bunga yang menjadi obyek dalam pembahasan ini adalah tingkat bunga kredit konsumsi.

3.4 Batasan Variabel

1. Kredit Konsumsi

Adalah tingkat permintaan kredit konsumsi perbankan di Sulawesi Selatan tahun 1998-2007.

2. Pendapatan Perkapita

Adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Konstan yang dibagi dengan jumlah penduduk masyarakat daerah Sulawesi-Selatan tahun 1998-2007.

3. Tingkat Bunga

Adalah jumlah tertentu bunga yang harus dibayarkan peminjam kepada pemberi pinjaman atas sejumlah uang tertentu untuk membiayai konsumsi dan investasi. Tingkat bunga yang menjadi obyek dalam pembahasan ini adalah tingkat bunga kredit konsumsi.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

Propinsi Sulawesi Selatan yang beribukota di kota Makassar terletak antara $0^{\circ} 12' - 80^{\circ}$ lintang selatan dan $116^{\circ} 48' - 122^{\circ} 36'$ bujur timur. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah utara : Propinsi Sulawesi Barat
- Sebelah timur : Teluk Bone dan Propinsi Sulawesi Tenggara
- Sebelah selatan : Laut Flores
- Sebelah barat : Selat Makassar

4.2 Indikator Ekonomi Sulawesi Selatan

4.2.1 Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi

Apabila melihat besaran PDRB, perkembangan ekonomi propinsi Sulawesi Selatan dari tahun ke tahun semakin membaik. Hal ini ditunjukkan dengan angka PDRB atas dasar harga berlaku yang selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2006 misalnya nilainya telah mencapai sekitar Rp.60.902,82 milyar atau terjadi peningkatan sekitar 17,62 persen bila dibandingkan dengan keadaan tahun sebelumnya.

Dengan demikian, provinsi Sulawesi selatan memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDB Nasional pada tahun 2006 sekitar 1,82 persen. Hal ini berarti sumbangan Sulawesi Selatan terhadap PDB Nasional masih relatif kecil. Kontribusi ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2005 yang mencapai 1,86

persen. Hal ini dikarenakan situasi yang kurang kondusif dalam perekonomian global yang disebabkan meningkatnya harga minyak mentah dunia yang mempengaruhi perekonomian nasional serta mempengaruhi perekonomian daerah, terlebih provinsi Sulawesi-Selatan masih mengimpor minyak mentah.

Tabel 2 PDB Nasional Dan PDRB Sulawesi Selatan Atas Dasar Harga Konstan

Tahun	PDB Nasional (milyar Rp.)	PDRB Sul-Sel (milyar Rp.)	Persentase Sul_Sel terhadap Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)
2002	1.820.833,4	33.790,63	1,85
2003	2.013.674,9	35.644,23	1,77
2004	2.273.141,5	37.529,04	1,65
2005	2.784.960,4	36.421,78	1,30
2006	3.338.195,7	38.867,67	1,16
2007	3.983.110,5	40.910,15	1,02

Sumber : BPS "Indikator ekonomi Sulawesi Selatan Tahun 2007"

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB atas dasar harga konstan yang berhasil diciptakan pada tahun tertentu dibandingkan dengan nilai tahun sebelumnya. Penggunaan angka atas dasar harga konstan ini dimaksudkan untuk menghindari perubahan harga, sehingga perubahan yang diukur merupakan pertumbuhan riil ekonomi. Mulai tahun penghitungan 2000 pertumbuhan ekonomi baik nasional maupun regional dihitung dengan menggunakan harga konstan tahun 2000 sebagai tahun dasar. Tabel dibawah ini menyajikan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan ekonomi Sulawesi Selatan selama tahun 2000-2007.

persen. Hal ini dikarenakan situasi yang kurang kondusif dalam perekonomian global yang disebabkan meningkatnya harga minyak mentah dunia yang mempengaruhi perekonomian nasional serta mempengaruhi perekonomian daerah, terlebih provinsi Sulawesi-Selatan masih mengimpor minyak mentah.

Tabel 2 PDB Nasional Dan PDRB Sulawesi Selatan Atas Dasar Harga Konstan

Tahun	PDB Nasional (milyar Rp.)	PDRB Sul-Sel (milyar Rp.)	Persentase Sul_Sel terhadap Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)
2002	1.820.833,4	33.790,63	1,85
2003	2.013.674,9	35.644,23	1,77
2004	2.273.141,5	37.529,04	1,65
2005	2.784.960,4	36.421,78	1,30
2006	3.338.195,7	38.867,67	1,16
2007	3.983.110,5	40.910,15	1,02

Sumber : BPS "Indikator ekonomi Sulawesi Selatan Tahun 2007"

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB atas dasar harga konstan yang berhasil diciptakan pada tahun tertentu dibandingkan dengan nilai tahun sebelumnya. Penggunaan angka atas dasar harga konstan ini dimaksudkan untuk menghindari perubahan harga, sehingga perubahan yang diukur merupakan pertumbuhan riil ekonomi. Mulai tahun penghitungan 2000 pertumbuhan ekonomi baik nasional maupun regional dihitung dengan menggunakan harga konstan tahun 2000 sebagai tahun dasar. Tabel dibawah ini menyajikan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan ekonomi Sulawesi Selatan selama tahun 2000-2007.

persen. Hal ini dikarenakan situasi yang kurang kondusif dalam perekonomian global yang disebabkan meningkatnya harga minyak mentah dunia yang mempengaruhi perekonomian nasional serta mempengaruhi perekonomian daerah, terlebih provinsi Sulawesi-Selatan masih mengimpor minyak mentah.

Tabel 2 PDB Nasional Dan PDRB Sulawesi Selatan Atas Dasar Harga Konstan

Tahun	PDB Nasional (milyar Rp.)	PDRB Sul-Sel (milyar Rp.)	Persentase Sul_Sel terhadap Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)
2002	1.820.833,4	33.790,63	1,85
2003	2.013.674,9	35.644,23	1,77
2004	2.273.141,5	37.529,04	1,65
2005	2.784.960,4	36.421,78	1,30
2006	3.338.195,7	38.867,67	1,16
2007	3.983.110,5	40.910,15	1,02

Sumber : BPS "Indikator ekonomi Sulawesi Selatan Tahun 2007"

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB atas dasar harga konstan yang berhasil diciptakan pada tahun tertentu dibandingkan dengan nilai tahun sebelumnya. Penggunaan angka atas dasar harga konstan ini dimaksudkan untuk menghindari perubahan harga, sehingga perubahan yang diukur merupakan pertumbuhan riil ekonomi. Mulai tahun penghitungan 2000 pertumbuhan ekonomi baik nasional maupun regional dihitung dengan menggunakan harga konstan tahun 2000 sebagai tahun dasar. Tabel dibawah ini menyajikan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan ekonomi Sulawesi Selatan selama tahun 2000-2007.

Table 3 Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Sul-Sel tahun 2002-2007.

Tahun	PDRB Harga Berlaku(milyarRp)	Perkembangan (persen)	PDRB Harga Konstan(milyarRp)	Pertumbuhan (persen)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2002	35.344,43	10,67	33.790,63	4,08
2003	39.414,66	11,52	35.644,23	5,42
2004	44.744,53	13,52	37.529,04	5,26
2005	51.780,44	15,72	36.421,78	6,05
2006	60.902,82	17,62	38.867,67	6,72
2007	72.988,10	18,22	40.910,15	6,91
Rata-rata	xxx	13,81	Xxx	5,51

Sumber : BPS "Indikator ekonomi Sulawesi Selatan Tahun 2007"

Selama periode 2002-2007 perekonomian Sulawesi Selatan relative stabil dengan rata-rata pertumbuhan 5,51 persen pertahun, hal ini membaik jika dibandingkan rata-rata sebelumnya yang hanya mencapai 5,21 persen pertahun. Setelah krisis ekonomi tahun 1998 kinerja ekonomi Sulawesi Selatan mulai membaik sejak tahun 2001, ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang semakin meningkat, yakni pada tahun 2001 tumbuh 5,23 persen, tahun 2002 tumbuh melambat sekitar 4,08 persen, kemudian tumbuh lagi 5,42 persen pada tahun 2003, selanjutnya sedikit melambat pada tahun 2004 tumbuh 5,26 persen, tahun 2005 tumbuh 6,05 persen dan pada tahun 2007, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan mencapai angka 6,91 persen.

Selama periode 2002-2007, perekonomian Sulawesi Selatan relative selalu lebih tinggi dibandingkan dengan perekonomian nasional. Pada tahun 2007 misalnya

perekonomian Sulawesi Selatan tumbuh cukup baik, yakni sekitar 6,91 persen sedangkan pada level nasional hanya tumbuh sekitar 5,48 persen

4.2.2 Struktur Ekonomi

Manfaat lain dari angka PDRB adalah untuk mengetahui struktur perekonomian suatu daerah dengan melihat peranan masing-masing sector terhadap total PDRB-nya.

Table 4 Struktur Ekonomi Sulawesi Selatan, Tahun 2002-2007 (dalam persen)

Lapangan usaha	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Nas. 2007
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.pertanian	35,68	34,02	31,57	31,26	30,40	30,01	12,90
2.pertambangan/penggalian	6,73	7,48	8,84	9,10	8,62	8,88	10,2
3.industri pengolahan	13,80	13,95	13,97	13,78	13,54	13,93	28,08
4.Listrik, gas dan air	1,17	1,17	1,08	1,06	1,03	1,03	0,91
5.Bangunan	4,53	4,56	4,79	4,79	4,58	5,11	7,46
6.Perdagangan	15,06	15,23	15,23	15,22	15,61	15,81	14,87
7.Angkutan & komunikasi	6,66	7,03	7,29	7,74	8,38	8,56	6,92
8.Lembaga keuangan	4,53	5,00	6,11	5,98	6,03	6,14	8,13
9.Jasa-jasa	12,03	11,42	11,12	11,06	11,80	11,72	10,14

Sumber : BPS "PDRB Sulawesi Selatan Tahun 2007"

Struktur dari perekonomian Sulawesi Selatan pada kurun waktu tahun 2002-2007 tidak mengalami pergeseran yang cukup signifikan. Peran sektor pertanian terhadap perekonomian Sulawesi Selatan masih menjanjikan yaitu rata-rata 29,22 persen, meski peran serta sektor pertanian sejak tahun 2003 terus menurun hingga tahun 2007 menjadi 30,01 persen. Tingginya peranan ini ditopang oleh sub-sektor tanaman bahan makanan (tabama) dengan kontribusi rata-rata 13,13 persen. Hal ini

perekonomian Sulawesi Selatan tumbuh cukup baik, yakni sekitar 6,91 persen sedangkan pada level nasional hanya tumbuh sekitar 5,48 persen

4.2.2 Struktur Ekonomi

Manfaat lain dari angka PDRB adalah untuk mengetahui struktur perekonomian suatu daerah dengan melihat peranan masing-masing sector terhadap total PDRB-nya.

Table 4 Struktur Ekonomi Sulawesi Selatan, Tahun 2002-2007 (dalam persen)

Lapangan usaha	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Nas. 2007
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.pertanian	35,68	34,02	31,57	31,26	30,40	30,01	12,90
2.pertambangan/penggalian	6,73	7,48	8,84	9,10	8,62	8,88	10,2
3.industri pengolahan	13,80	13,95	13,97	13,78	13,54	13,93	28,08
4.Listrik, gas dan air	1,17	1,17	1,08	1,06	1,03	1,03	0,91
5.Bangunan	4,53	4,56	4,79	4,79	4,58	5,11	7,46
6.Perdagangan	15,06	15,23	15,23	15,22	15,61	15,81	14,87
7.Angkutan & komunikasi	6,66	7,03	7,29	7,74	8,38	8,56	6,92
8.Lembaga keuangan	4,53	5,00	6,11	5,98	6,03	6,14	8,13
9.Jasa-jasa	12,03	11,42	11,12	11,06	11,80	11,72	10,14

Sumber : BPS "PDRB Sulawesi Selatan Tahun 2007"

Struktur dari perekonomian Sulawesi Selatan pada kurun waktu tahun 2002-2007 tidak mengalami pergeseran yang cukup signifikan. Peran sektor pertanian terhadap perekonomian Sulawesi Selatan masih menjanjikan yaitu rata-rata 29,22 persen, meski peran serta sektor pertanian sejak tahun 2003 terus menurun hingga tahun 2007 menjadi 30,01 persen. Tingginya peranan ini ditopang oleh sub-sektor tanaman bahan makanan (tabama) dengan kontribusi rata-rata 13,13 persen. Hal ini

menunjukkan bahwa sebagian besar jumlah penduduk Sulawesi Selatan perekonomiannya masih mengandalkan pada pertanian tanaman pangan.

Selain pertanian, sektor lain yang mempunyai kontribusi yang cukup besar adalah sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor jasa-jasa yang masing-masing menyumbang 13,93 persen; 15,81 persen; dan 11,80 persen (keadaan tahun 2007) terhadap pembentukan total PDRB Sulawesi Selatan. Sedangkan sektor listrik, gas dan air bersih pada tahun yang sama mempunyai kontribusi yang paling kecil hanya sekitar 1.03 persen.

Bila dicermati lebih dalam maka selama kurun waktu 2002-2007. Tampak bahwa kontribusi sektor pertanian sejak tahun 2002 mengalami pergeseran menurun dari 35,68 persen menjadi 30,01persen pada tahun 2007. Yang disebabkan karena adanya pergeseran lahan pertanian menjadi lahan pemukiman yang nusim dilakukan tanpa adanya kendali dari pemerintah.

Apabila dibandingkan antara struktur ekonomi Sulawesi Selatan dengan struktur ekonomi nasional tampak sangat berbeda. Dapat dilihat Pada tahun 2007 misalnya, sektor primer yang meliputi sektor pertanian dan pertambangan-penggalian pada perekonomian Sulawesi Selatan memberikan kontribusi sekitar 38,89 persen, sedangkan pada perekonomian nasional hanya menyumbang 22,92 persen. Pada sektor sekunder yang meliputi sektor industri pengolahan, gas dan air bersih, dan sektor bangunan pada perkeekonomian Sulawesi Selatan hanya menyumbang 20,07 persen sedangkan pada perekonomian nasional memberi kontribusi sekitar 36,44 persen.

4.2.3 PDRB Perkapita

Dengan berkembangnya perekonomian Sulawesi selatan tentunya akan berdampak pada peningkatan PDRB Perkapita. Namun angka tersebut belum menggambarkan penerimaan penduduk secara nyata dan merata, karena angka itu hanya merupakan angka rata-rata. Walaupun demikian angka tersebut sudah dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk melihat rata-rata tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah.

Setiap tahun PDRB perkapita Sulawesi Selatan mengalami peningkatan. Dalam lima tahun terakhir misalnya, dari Rp 4.512.320 pada tahun 2003 menjadi Rp.5.397.576 pada tahun 2007 atau meningkat 0,9 kali lipat.

Bila dibandingkan dengan PDB Perkapita (Nasional) PDRB Perkapita Sulawesi Selatan masih relatif rendah. Pada tahun 2002 misalnya PDB Perkapita telah mencapai Rp 8.631.704 dan pada tahun 2007 telah mencapai angka sekitar Rp.19.224.837 (tabel).

Tabel 5 PDRB Perkapita Sul-Sel dan PDB Perkapita Indonesia, Tahun 2002-2007

Tahun	PDRB Perkapita Sul-sel (rupiah)	PDB Perkapita Nasional (rupiah)
(1)	(2)	(3)
2002	4.371.114	8.631.704
2003	4.512.320	9.353.904
2004	4.655.795	10.434.236
2005	4.849.963	12.724.338
2006	5.094.268	15.252.041
2007	5.397.576	19.224.837

Sumber : BPS "PDRB Sulawesi Selatan Tahun 2007"

4.2.3 PDRB Perkapita

Dengan berkembangnya perekonomian Sulawesi selatan tentunya akan berdampak pada peningkatan PDRB Perkapita. Namun angka tersebut belum menggambarkan penerimaan penduduk secara nyata dan merata, karena angka itu hanya merupakan angka rata-rata. Walaupun demikian angka tersebut sudah dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk melihat rata-rata tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah.

Setiap tahun PDRB perkapita Sulawesi Selatan mengalami peningkatan. Dalam lima tahun terakhir misalnya, dari Rp 4.512.320 pada tahun 2003 menjadi Rp.5.397.576 pada tahun 2007 atau meningkat 0,9 kali lipat.

Bila dibandingkan dengan PDB Perkapita (Nasional) PDRB Perkapita Sulawesi Selatan masih relatif rendah. Pada tahun 2002 misalnya PDB Perkapita telah mencapai Rp 8.631.704 dan pada tahun 2007 telah mencapai angka sekitar Rp.19.224.837 (tabel).

Tabel 5 PDRB Perkapita Sul-Sel dan PDB Perkapita Indonesia, Tahun 2002-2007

Tahun	PDRB Perkapita Sul-sel (rupiah)	PDB Perkapita Nasional (rupiah)
(1)	(2)	(3)
2002	4.371.114	8.631.704
2003	4.512.320	9.353.904
2004	4.655.795	10.434.236
2005	4.849.963	12.724.338
2006	5.094.268	15.252.041
2007	5.397.576	19.224.837

Sumber : BPS "PDRB Sulawesi Selatan Tahun 2007"

4.3 Perkembangan Pendapatan Perkapita Provinsi Sulawesi Selatan

Salah satu indikator pengukuran pertumbuhan ekonomi di suatu negara adalah dengan melihat indikator perkembangan Produk Domestik Brutonya (PDB), dimana PDB adalah nilai total uang dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun di suatu negara. Dimana perkembangan PDB dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi di tiap daerahnya dalam hal ini perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto merupakan nilai total uang dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun di wilayah tertentu tanpa membedakan kepemilikan faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi barang.

Data Pendapatan Domestik Raperiodal Bruto (PDRB) merupakan data dasar dan utama dalam menyusun kerangka perencanaan pembangunan di daerah, disamping sebagai sumber informasi tentang bagaimana kondisi dan perekonomian secara makro regional. Oleh karena itu data series PDRB pada dasarnya tidak hanya bermanfaat bagi kepentingan teknis perencanaan pembangunan, tetapi juga dapat menjadi bahan untuk menentukan kebijakan baik bagi para pelaku pembangunan seperti pemerintah maupun untuk segenap pelaku ekonomi.

Pendapatan perkapita sendiri adalah nilai yang diambil dari Produk Domestic Regional Bruto (PDRB) dibagi dengan jumlah penduduk pada suatu wilayah tertentu dalam kurun waktu satu tahun. Pendapatan perkapita adalah data yang dipergunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah tertentu serta seberapa besar perkembangan ekonomi yang tumbuh di wilayah tersebut.

Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta mengukur tingkat kesejahteraan di Provinsi Sulawesi Selatan dimana kondisi perekonomian daerah tersebut sangat tergantung pada potensi dan sumber daya yang dimiliki, berbagai kebijaksanaan serta upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah khususnya pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat maka perlu dicermati seberapa besar pendapatan per kapita di provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 6 Perkembangan Pendapatan Per Kapita (dalam juta rupiah)

Tahun	PDRB (Harga Konstan)	Jumlah Penduduk	Pendapatan Per Kapita
1998	9.366,229,012	7.802,248	1.230,697
1999	9.631,075,201	7.849,214	1.254,233
2000	10.101,471,102	7.978,435	4.073,627
2001	32.444,233,288	7.802,732	4.199,780
2002	33.790,639,298	7.891,792	4.371,114
2003	35.644,238,287	7.960,991	4.512,320
2004	37.529,045,537	8.213,864	4.655,795
2005	36.421,787,892	7.379,370	4.849,963
2006	38,867,679,245	7.497,701	5,094.268
2007	40.910,151,910	9.150,021	5.214,366

Sumber Data : Badan Pusat Statistik (Sulawesi Selatan dalam angka 1998-2007)

Pertumbuhan pendapatan per kapita setiap tahunnya mengalami fluktuasi dengan tingkat pertumbuhan yang mengalami peningkatan. Dimana pada awal periode yaitu pada tahun 1998 total pendapatan per kapita Sulawesi Selatan masih sekitar Rp. 1.230,697 juta. Pada tahun berikutnya Pendapatan per kapita mengalami peningkatan relatif kecil yakni sebesar Rp. 1.251,233 Juta pada tahun 1999 dan 4,74% pada tahun 2000 meningkat lebih besar Rp. 4.073,627 Juta. Pendapatan per kapita provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan yang kecil pada tahun-tahun berikutnya dimana pada tahun 2001 pendapatan perkapita mengalami peningkatan sebesar Rp 4.199,780 Juta meningkat, tahun 2002 sebesar Rp. 4.371,114 juta, tahun 2003 sebesar Rp. 4.512,320 Juta, tahun 2004 sebesar Rp. 4.655,795 Juta, tahun 2005 sebesar Rp. 4.849,963 Juta. Baru pada tahun 2006 pendapatan per kapita provinsi Sulawesi Selatan menyentuh Rp. 5.094,268 Juta dan pada akhir tahun 2007 sebesar Rp 5.214,366 Juta. Pendapatan per kapita Sulawesi selatan relatif stabil, hal ini dikarenakan kondisi pembangunan serta pertumbuhan ekonomi di provinsi Sulawesi Selatan pasca krisis ekonomi pada tahun 1998 meningkat signifikan, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan ikut meningkat.

Pertumbuhan pendapatan per kapita setiap tahunnya mengalami fluktuasi dengan tingkat pertumbuhan yang mengalami peningkatan. Dimana pada awal periode yaitu pada tahun 1998 total pendapatan per kapita Sulawesi Selatan masih sekitar Rp. 1.230,697 juta. Pada tahun berikutnya Pendapatan per kapita mengalami peningkatan relatif kecil yakni sebesar Rp. 1.251,233 Juta pada tahun 1999 dan 4,74% pada tahun 2000 meningkat lebih besar Rp. 4.073,627 Juta. Pendapatan per kapita provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan yang kecil pada tahun-tahun berikutnya dimana pada tahun 2001 pendapatan perkapita mengalami peningkatan sebesar Rp 4.199,780 Juta meningkat, tahun 2002 sebesar Rp. 4.371,114 juta, tahun 2003 sebesar Rp. 4.512,320 Juta, tahun 2004 sebesar Rp. 4.655,795 Juta, tahun 2005 sebesar Rp. 4.849,963 Juta. Baru pada tahun 2006 pendapatan per kapita provinsi Sulawesi Selatan menyentuh Rp. 5.094,268 Juta dan pada akhir tahun 2007 sebesar Rp 5.214,366 Juta. Pendapatan per kapita Sulawesi selatan relatif stabil, hal ini dikarenakan kondisi pembangunan serta pertumbuhan ekonomi di provinsi Sulawesi Selatan pasca krisis ekonomi pada tahun 1998 meningkat signifikan, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan ikut meningkat.

4.4 Perkembangan Tingkat Suku Bunga Kredit

Tingkat suku bunga kredit merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi pengambilan kredit konsumsi di provinsi Sulawesi Selatan, hal ini menjadikan tingkat suku bunga kredit menjadi acuan-acuan lembaga lembaga pemberi kredit dalam menganalisis untuk memberikan jumlah kredit kepada masyarakat. Tingkat suku bunga kredit terbagi atas 3 jenis dan menurut jenis kredit yang akan disalurkan antara lain:

- Kredit Investasi
- Kredit Modal Kerja
- Kredit Konsumsi

Tabel 7 Tingkat Pertumbuhan Suku bunga rata-rata kredit konsumsi, investasi dan modal kerja (%) dapat kita lihat dalam tabel di bawah :

Tahun	Kredit Konsumsi	Kredit Investasi	Kredit Modal Kerja
1998	16,00	23,16	32,37
1999	16,00	22,93	28,89
2000	16,77	16,59	18,43
2001	19,25	17,90	19,19
2002	20,21	17,82	18,25
2003	18,69	15,68	15,07
2004	16,57	14,05	13,41
2005	16,83	15,66	16,23
2006	17,58	15,01	15,07
2007	16,13	13,01	13,00

Sumber Data : Badan Pusat Statistik (Sulawesi Selatan dalam angka 1998-2007)

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa perkembangan tingkat bunga kredit mengalami fluktuasi ini disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penetapan tingkat bunga kredit. Salah satunya adalah tingkat bunga perbankan dimana tingkat bunga perbankan yang ditetapkan oleh Bank Sentral banyak dipengaruhi oleh kebijakan atau keputusan yang diambil oleh pejabat Negara yang melihat dari faktor faktor perkembangan dan pertumbuhan ekonomi baik itu secara makro maupun mikro salah satunya untuk mengatur jumlah uang beredar di masyarakat dengan meningkatkan tingkat suku bunga akan menarik masyarakat untuk menabung sehingga mengurangi tingkat konsumsi masyarakat dan menurunkan tingkat bunga untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh kredit usaha yang ditujukan untuk membuka lapangan kerja dan mengurangi pengangguran.

4.5 Perkembangan Kredit Konsumsi Di Sul-Sel

Tabel 8 Perkembangan kredit konsumsi Di sulawesi selatan tahun 1998-2007
(juta rupiah)

Tahun	Konsumsi	Pertumbuhan (Persen)
1998	925.358	-
1999	1.069.518	15,58
2000	1.232.378	15,22
2001	1.837.501	49,10
2002	2.374.240	29,21
2003	3.291.321	38,63
2004	4.665.335	41,75
2005	6.745.515	44,59
2006	8.033.235	19,09
2007	9.153.215	
Rata-rata	3.119.913	24,35

Sumber Data : Badan Pusat Statistik (Statistik Keuangan Daerah 2007)

Perkembangan kredit konsumsi pada tahun 1998 turun menjadi Rp. 925 miliar rupiah atau turun 9,70 persen dibandingkan pada tahun sebelumnya. Dampak krisis ekonomi terhadap permintaan kredit konsumsi tidak terlalu berarti sebab pada tahun berikutnya permintaan kredit konsumsi kembali meningkat. Pada tahun 1999 jumlah kredit konsumsi sebesar Rp. 1,06 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 15,58 persen, padahal jika dibandingkan dengan jenis kredit yang lain di tahun yang sama justru mengalami penurunan. Pada tahun 2000 kredit konsumsi juga mengalami

pertumbuhan yaitu sebesar 15,22 persen atau Rp.1,23 triliun dan pada tahun 2001 kredit konsumsi tumbuh sebesar 49,10 persen atau Rp. 1,8 triliun. Hal ini seiring dengan peningkatan pemberian kredit perumahan, dan kendaraan bermotor.

Pada tahun 2002 jumlah kredit konsumsi sebesar Rp.2,37 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 29,21 persen, bahkan pada tahun-tahun berikutnya perkembangan kredit cukup signifikan hal ini dapat dilihat dari pertambahan jumlah kredit konsumsi dari tahun 2004 sampai tahun 2006. Pada tahun 2004 jumlah kredit konsumsi sebesar Rp. 4,67 triliun atau mengalami pertumbuhan 41,75 persen, begitu pula pada tahun 2005 jumlah kredit konsumsi sebesar Rp. 6,74 triliun atau tumbuh sebesar 44,59 persen.

Pada tahun 2006 jumlah kredit konsumsi sebesar Rp. 8,03 triliun atau meningkat sebesar 19,09 persen. Kredit konsumsi yang disalurkan selama tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 jumlahnya jauh lebih besar jika dibandingkan dengan kredit investasi. Padahal sebelumnya kredit investasi selalu lebih besar jika dibandingkan dengan kredit konsumsi.

4.6 Hasil Perhitungan Empirik

Setelah memberikan gambaran umum mengenai perkembangan masing-masing variabel yang dimaksud dalam penulisan ini, maka pada bagian ini akan dibahas hasil yang diperoleh dalam pengujian. Tingkat signifikan antara variabel-variabel tersebut baik secara mandiri maupun keseluruhan digunakan model analisis regresi berganda.

Dalam pengujian ini digunakan data tahunan yaitu dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2007. Adapun data yang dipergunakan adalah data Kredit konsumsi menjadi variabel terikat (dependent) (C_{kk}). Sedangkan untuk variabel bebasnya (independent) adalah Suku Bunga Kredit Konsumsi (X_1), dan Pendapatan Per Kapita (X_2). Setelah meregresi data yang ada maka diperoleh hasil sebagai berikut :

$$C_{kk} = 14862,974 + 1,855X_1 - 1048,649X_2$$

(2,028) (4,095) (-2,345)

Angka dalam kurung menunjukkan nilai t

$$R \text{ Square } (R^2) = 0,715$$

$$\text{Adjusted } R^2 = 0,633$$

$$F\text{-hitung} = 8,768$$

Besarnya konstanta pada persamaan diatas adalah 14862,974. Hal Ini berarti bahwa pada saat tidak ada pengaruh dari tingkat bunga dan pendapatan per kapita maka banyaknya jumlah permintaan kredit konsumsi sebesar 14862,974.

Untuk dapat mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial dengan asumsi bahwa variabel lainnya adalah konstan, maka dapat dilihat pada koefisien regresinya.

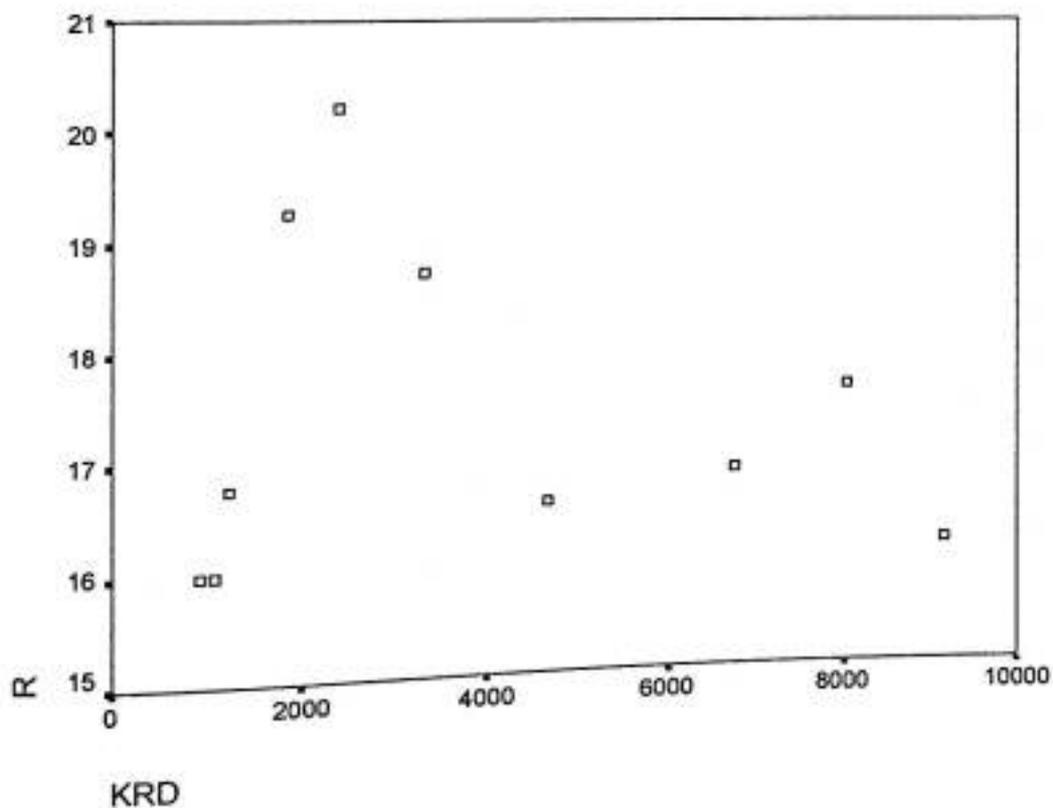
4.6.1 Hubungan Antara Suku Bunga dengan Kredit Konsumsi

Untuk suku bunga, koefisien regresinya sebesar -1048,649. Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan suku bunga sebesar 1 persen, maka akan membawa pengaruh penurunan pada jumlah permintaan kredit konsumsi sebesar -1048,649 atau sebaliknya dengan asumsi bahwa variabel pendapatan per kapita konstan.

Pada nilai konstanta yang dimana besarnya nilai t-hitung 2,028 (tidak signifikan), dimana untuk variabel suku bunga kita peroleh t-hitung sebesar -2,345 yang dapat diartikan ada pengaruh nyata antara tingkat suku bunga terhadap permintaan kredit konsumsi yang negatif dan signifikan.

Gambar 4

Scatter Diagram suku bunga terhadap kredit konsumsi



Dari gambar 4, dapat kita lihat posisi suku bunga terhadap perkembangan kredit konsumsi, dimana suku bunga KK (Kredit Konsumsi) pada tahun 1998-1999 adalah sama yaitu berada pada titik 16% dan KK pada tahun 1998 & 1999 adalah Rp. 925.358 Juta dan Rp 1.069.518 Juta. Pada tahun berikutnya yaitu tahun 2000, suku bunga KK dinaikkan sebesar 16,77 % yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah KK sebesar Rp. 1.232.378 Juta, tahun 2001 suku bunga meningkat sebesar 2,48 point menjadi 19,25% dan KK juga meningkat sebesar Rp 1.837.501 juta. Pada tahun 2002 suku bunga KK meningkat mencapai level tertinggi yaitu sebesar 20,21% sehingga KK meningkat sebesar Rp 2.374.240 Juta.

Tahun 2003 tingkat suku bunga diturunkan 1.52 point menjadi 18,69 % sehingga menyebabkan pengambilan kredit konsumsi meningkat sebesar Rp 3.291.321 Juta. Tahun berikutnya yaitu tahun 2004 suku bunga KK kembali diturunkan pada titik 16,57 % dan menyebabkan pengambilan KK meningkat sebesar Rp. 4.665.335 Juta. Pada tahun 2005 suku bunga KK dinaikkan sebesar 16,83 % tetapi tidak menyurutkan masyarakat untuk mengambil KK sehingga tingkat KK mencapai Rp. 6.745.515 Juta. Begitupun tahun 2006 dimana ketika suku bunga KK dinaikkan sebesar 17,58 % pengambilan KK tetap meningkat sebesar Rp. 8.033.235 Juta, dan tahun 2007 suku bunga KK kembali turun dan mencapai 16,13 % sehingga KK meningkat sebesar Rp 9.153.215 Juta pada akhir Agustus 2007.

4.6.2 Hubungan Antara Pendapatan per Kapita dengan Kredit Konsumsi

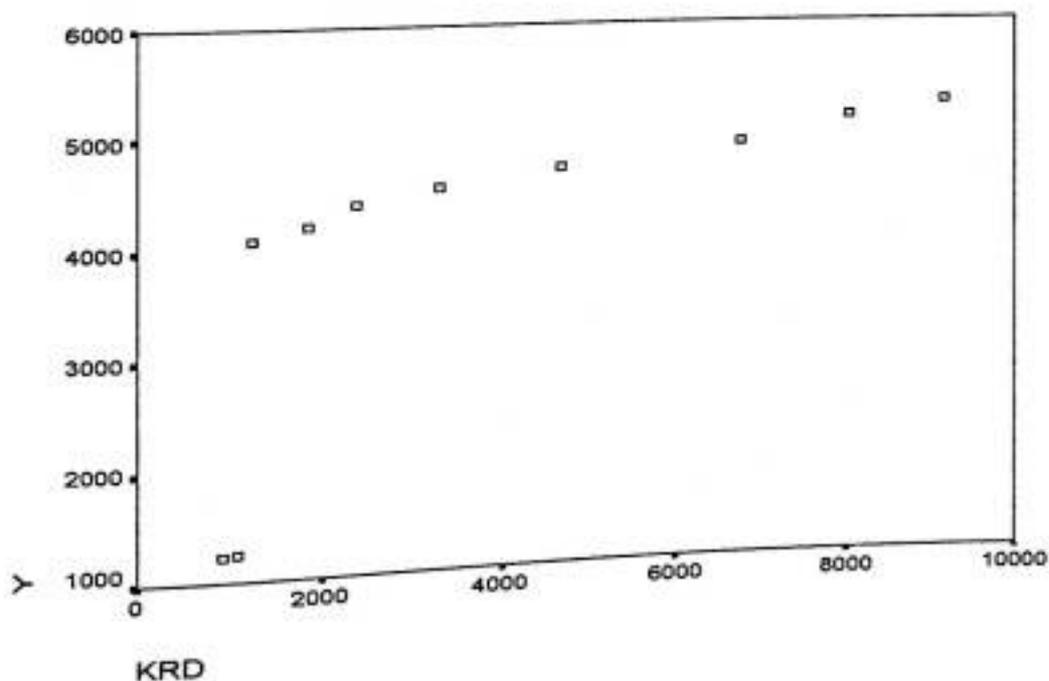
Untuk variabel pendapatan per kapita, koefisien regresinya menunjukkan angka 1,855. Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan pendapatan per kapita sebesar 1 persen akan menaikkan permintaan kredit konsumsi sebesar 1,855 atau sebaliknya dengan asumsi variabel suku bunga konstan.

Untuk mengetahui tingkat signifikansi antara variabel bebas dan variabel terikat secara parsial dilakukan uji- t . Derajat kepercayaan yang digunakan yakni sebesar 95 persen, dikatakan signifikan jika t -hitung lebih besar dari t -tabel (t -hitung $>$ t -tabel).

Pada variabel Pendapatan per kapita diperoleh t -hitung sebesar 4,095 yang artinya ada pengaruh nyata antara pendapatan per kapita dengan permintaan kredit konsumsi yang positif dan signifikan.

Gambar 5

Scatter Diagram pendapatan per kapita terhadap kredit konsumsi



Dari gambar 5, dapat kita lihat tingkat Pendapatan Per Kapita Prov Sul-Sel terhadap perkembangan kredit konsumsi, dimana Pendapatan Per Kapita Prov Sul-Sel pada tahun 1998 sebesar Rp 1.230.697 Juta dan KK sebesar Rp. 925.358 Juta, tahun 1999 Pendapatan Per Kapita Prov Sul-Sel meningkat Rp. 24 miliar sebesar Rp. 1.254.233 Juta dan KK juga meningkat sebesar Rp 1.069.518 Juta. Pada tahun berikutnya yaitu tahun 2000, Pendapatan Per Kapita Prov Sul-Sel meningkat tajam sebesar Rp 2.9 trilliun dan mencapai Rp. 4.073.627 Juta, begitupun dengan KK yang meningkat sebesar Rp. 1.232.378 Juta, tahun 2001 Pendapatan Per Kapita Prov Sul-Sel sebesar Rp. 4.199.780 dan KK juga sebesar Rp 1.837.501 juta. Pada tahun 2002 Pendapatan Per Kapita Prov Sul-Sel mencapai 4.371.114 dan KK meningkat sebesar Rp 2.374.240 Juta.

Tahun 2003 Pendapatan Per Kapita Prov Sul-Sel meningkat Rp 160 miliar dan mencapai Rp. 4.512.320 Juta, sedangkan kredit konsumsi meningkat sebesar Rp 3.291.321 Juta. Tahun berikutnya yaitu tahun 2004 Pendapatan Per Kapita Prov Sul-Sel kembali meningkat Rp. 135 Milliar atau Rp. 4.655.795 sedangkan KK meningkat sebesar Rp. 4.665.335 Juta. Pada tahun 2005 Pendapatan Per Kapita Prov Sul-Sel sebesar 4.849.963 sedangkan KK sehingga tingkat KK mencapai Rp. 6.745.515 Juta. Begitupun tahun 2006 Pendapatan Per Kapita Prov Sul-Sel meningkat Rp 200 miliar dan mencapai Rp. 5.094.268 Juta begitupun dengan KK yang tetap meningkat dan mencapai Rp. 8.033.235 Juta, dan tahun 2007 Pendapatan Per Kapita Prov Sul-Sel sebesar Rp. 5.214.366 dan KK sebesar Rp 9.153.215 Juta pada akhir Agustus 2007.

Dari gambar 5, dapat kita lihat tingkat Pendapatan Per Kapita Prov Sul-Sel terhadap perkembangan kredit konsumsi, dimana Pendapatan Per Kapita Prov Sul-Sel pada tahun 1998 sebesar Rp 1.230.697 Juta dan KK sebesar Rp. 925.358 Juta, tahun 1999 Pendapatan Per Kapita Prov Sul-Sel meningkat Rp. 24 miliar sebesar Rp. 1.254.233 Juta dan KK juga meningkat sebesar Rp 1.069.518 Juta. Pada tahun berikutnya yaitu tahun 2000, Pendapatan Per Kapita Prov Sul-Sel meningkat tajam sebesar Rp 2.9 trilliun dan mencapai Rp. 4.073.627 Juta, begitupun dengan KK yang meningkat sebesar Rp. 1.232.378 Juta, tahun 2001 Pendapatan Per Kapita Prov Sul-Sel sebesar Rp. 4.199.780 dan KK juga sebesar Rp 1.837.501 juta. Pada tahun 2002 Pendapatan Per Kapita Prov Sul-Sel mencapai 4.371.114 dan KK meningkat sebesar Rp 2.374.240 Juta.

Tahun 2003 Pendapatan Per Kapita Prov Sul-Sel meningkat Rp 160 miliar dan mencapai Rp. 4.512.320 Juta, sedangkan kredit konsumsi meningkat sebesar Rp 3.291.321 Juta. Tahun berikutnya yaitu tahun 2004 Pendapatan Per Kapita Prov Sul-Sel kembali meningkat Rp. 135 Miliar atau Rp. 4.655.795 sedangkan KK meningkat sebesar Rp. 4.665.335 Juta. Pada tahun 2005 Pendapatan Per Kapita Prov Sul-Sel sebesar 4.849.963 sedangkan KK sehingga tingkat KK mencapai Rp. 6.745.515 Juta. Begitupun tahun 2006 Pendapatan Per Kapita Prov Sul-Sel meningkat Rp 200 miliar dan mencapai Rp. 5.094.268 Juta begitupun dengan KK yang tetap meningkat dan mencapai Rp. 8.033.235 Juta, dan tahun 2007 Pendapatan Per Kapita Prov Sul-Sel sebesar Rp. 5.214.366 dan KK sebesar Rp 9.153.215 Juta pada akhir Agustus 2007.

Untuk dapat mengukur seberapa besar proporsi atau sumbangan variabel bebas terhadap naik turunnya variabel terikat, pada hasil regresi ditemukan besarnya koefisien determinasi sebesar 0,715 atau sebesar 71,5 Persen dari variasi naik dan turunnya jumlah permintaan kredit konsumsi yang ditentukan oleh pendapatan per kapita dan tingkat bunga. Sedangkan 28,5 persen naik turunnya permintaan kredit konsumsi ditentukan oleh faktor faktor di luar model.

Untuk dapat mengetahui tingkat signifikansi pengaruh daripada variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan dilakukan Uji-F. Dimana dapat dikatakan signifikan apabila F-hitung lebih besar dari F-tabel, dari hasil diperoleh sebesar 8,768. Hal ini berarti adanya pengaruh nyata variabel tingkat bunga dan pendapatan per kapita terhadap permintaan kredit konsumsi (signifikan) secara simultan.

Dari hasil penelitian di atas data ini dapat kita perbandingkan dengan beberapa penelitian terkait, antara lain penelitian yang dilakukan oleh Magri, dimana menunjukkan bahwa permintaan kredit konsumsi rumah tangga di Italia meningkat seiring dengan meningkatnya usia dan pendapatan (Magri, 2002 hal 22). Di samping itu disposable income juga memiliki pengaruh positif terhadap permintaan maupun penawaran kredit (Magri, 2002 hal 23). Hasil penelitian ini juga mempertegas teori yang dimana kenaikan tingkat suku bunga berpengaruh negatif terhadap permintaan kredit konsumsi, sedangkan peningkatan pendapatan berpengaruh positif terhadap permintaan kredit konsumsi.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil serta pembahasan yang telah dilakukan maka dapat kita tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari analisis linier berganda pada kredit konsumsi, dapat kita lihat bahwa suku bunga memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap permintaan kredit konsumsi.
2. Sedangkan analisis linier berganda pada kredit konsumsi pendapatan perkapita memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap permintaan kredit konsumsi.

5.2 Saran

1. Diharapkan kepada mahasiswa ataupun kalangan umum yang ingin meneliti tentang permintaan kredit konsumsi perbankan di Sulawesi-Selatan untuk menggunakan faktor-faktor eksternal selain tingkat suku bunga dan pendapatan perkapita dalam melihat ataupun ingin mengukur pengaruh dalam permintaan kredit konsumsi perbankan.
2. Diharapkan kepada pemerintah daerah maupun nasional agar dapat mengatur kebijakan dalam menerapkan tingkat suku bunga dalam mengelola jumlah kredit perbankan dan juga meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi tidak hanya daerah tetapi juga secara nasional agar mampu menciptakan suasana kondusif dalam perekonomian nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Asrianti. (2003), **Pengaruh Pendapatan per Kapita Tingkat Suku Bunga, Inflasi dan Tenaga Kerja Terhadap Konsumsi Non Makanan di Sulawesi-Selatan 1990-2000.**
- Badan Pusat Statistik, **Sulawesi Selatan Dalam Angka (2007)**
- Bank Indonesia, **Statistik Keuangan Daerah Sulawesi Selatan (Vol 8 No 1 2008)**
- Barnes, Sebastian dan Gary Young. 2003. **The rise in US household debt: assessing its causes and sustainability.** The Bank of England's Working Paper, No.206.
- Cox, Donald dan Tulio Jappeli. **The Effect of Borrowing Constraints on Consumer Liabilities.** 1993. *Journal of Money, Credit, and Banking*, Vol. 25 No.2.
- Crook, Jonathan. 2001. **The demand for household debt in the USA: evidence from the 1995 Survey of Consumer Finance.** *Applied Financial Economics*, 2001, 11, 83-91.
- Djumhana, Muhammad. 1996. **Hukum Perbankan di Indonesia.** Cipta Aditya Bakti, Bandung.
- Deliarnov, 1995. **Pengantar Ekonomi Makro.** Cetakan Pertama. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Gudjarati, N Damodar dan Zumarno Zain. 2002. **Ekonometrika Dasar.** Jakarta : Erlangga.

- Hasan, Iqbal. 2005. **Dasar-dasar Statistik (Statistik Inferensif)**. PT. Grafindo Aksara, Jakarta
- Hasibuan, Malayu. 2006. **Dasar-dasar Perbankan**. PT. Bumi Aksara, Jakarta
- Kasmir. 2000. **Manajemen Perbankan**. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kasmir. 2002. **Dasar-Dasar Perbankan**. PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Mankiw. 2003. **Macroeconomics**. Edisi Ketujuh. USA: Addison Wesley.
- Manullang, M. 1993. **Ekonomi Moneter**. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Magri, S. 2002. **Italian households' debt: determinants of demand and supply**. **Mimeo.Rome**: Bank of Italy.
- Nopirin. 1986. **Ekonomi Moneter I** Edisi Keempat 1992.
- Samuelson, Paul A., William D. Nordhaus. 2004. **Makro Ekonomi**. Edisi 17. Cetakan Pertama. Jakarta: Erlangga.
- Rosyidi, Suherman. 2001. **Pengantar Teori Ekonomi : Pendekatan kepada teori ekonomi mikro dan makro**. Edisi Baru. Cetakan Kelima. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, Sadono, 2000. **Makro Ekonomi Modern**, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sukmawati, (2001). **Pengaruh Kredit Perbankan Terhadap PDRB di Sulawesi-Selatan (1983-1998)**.
- Suyatno, Thomas, dkk. 1999. **Dasar-dasar Perkreditan**. Edisi Keempat. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Tarigan, Robinson. 2005. **Ekonomi Regional**. Edisi Revisi. PT Bumi Aksara, Jakarta
- Triandaru, Sigit dan Budisantoso, Totok. 2006. **Bank dan Lembaga Keuangan Lain**. Edisi Kedua. Salemba Empat, Jakarta

Wiryohasmono, Soetardi, 1982. **Konsep-konsep Kependudukan BKKBN**, Jakarta

<http://www.fiskal.depkeu.go.id/webbkf>

<http://www.BI.com>

<http://www.Amazon.com>

LAMPIRAN

Regression

Variables Entered/Removed(b)

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	R, Y(a)	.	Enter

a All requested variables entered.
b Dependent Variable: KRD

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.845(a)	.715	.633	1853.339267

a Predictors: (constant) R, Y...

ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Significance
1	Regression	60236460.721	2	30118230.361	8.768	.012(a)
	Residual	24044065.076	7	3434866.439		
	Total	84280525.798	9			

a Predictors: (constant) R, Y...
b Dependent Variable: KRD

Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Significance
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	14862.974	7329.752		2.028	.082
	Y	1.855	.453	.891	4.095	.005
	R	-1048.649	447.271	-.510	-2.345	.051

a Dependent Variable: KRD

DATA DALAM BENTUK LOGARITMA NATURAL

Y	Krd	R	X1	X2	X3
1.230,697	925.358	16,00	7,12	6,83	2,77
1.251,233	1.069.518	16,00	7,13	6,97	2,77
4.073,627	1.232.378	16,77	8,31	7,12	2,82
4.199,780	1.837.501	19,25	8,34	7,52	2,96
4.371,114	2.374.240	20,21	8,38	7,77	3,01
4.512,320	3.291.321	18,69	8,41	8,10	2,93
4.655,795	4.665.335	16,57	8,45	8,45	2,81
4.849,963	6.745.515	16,83	8,49	8,82	2,82
5,094.268	8.033.235	17,58	8,54	8,99	2,87
5.214,366	925.358	16,13	8,56	9,12	2,78
39.466,16	39.327,62	174,03	81,73	79,69	28,54